



LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN INDEKS WILLIAMSON DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN GRESIK



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Manfaat	3
1.4 Ruang Lingkup Kajian	3
1.5 Keluaran Kajian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pembangunan Ekonomi	5
2.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	6
2.2.1 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.....	7
2.2.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	8
2.2.3 Penentuan Sektor Basis Dan Keunggulan Komparatif & Kompetitif Wilayah.....	10
2.3 Ketimpangan.....	16
2.3.1 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan dan Cara Mengukur Ketimpangan Antar Wilayah	17
2.4 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah	22
BAB III METODOLOGI KAJIAN	25
3.1 Metode Kajian	25
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	25
3.3 Model Analisis	27
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	30
4.1 Perkembangan Ekonomi Wilayah Kabupaten Gresik	30
4.1.1 Perkembangan Sektoral PDRB Kabupaten Gresik.....	33



4.2	Perkembangan Demografi Kabupaten Gresik	39
4.2.1	Perkembangan Penduduk Kabupaten Gresik	39
4.2.2	Perkembangan Tenaga kerja Kabupaten Gresik.....	41
4.2.3	Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Gresik	42
4.3	Perhitungan Indeks Williamson.....	46
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN		49
5.1	Analisis Ketimpangan Kewilayahan.....	49
5.2	Analisis Korelasi Faktor-Faktor Penyebab Kesenjangan Antar Wilayah	52
5.3	Analisis Model Ekonometri.....	56
5.4	Pembahasan Hasil Penelitian	59
5.4.1	Pengaruh Antara Indikator Perekonomian Kecamatan dan Ketimpangan Wilayah	60
5.4.2	Pembangunan Kewilayahan Yang Inklusif Berpotensi Menurunkan Tingkat ketimpangan	62
5.4.3	Kebijakan Pemkab Dalam Menurunkan Ketimpangan Antar Wilayah	65
BAB VI PENUTUP		68
6.1	KESIMPULAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....		70
LAMPIRAN		71

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penggolongan Sektor Menurut SLQ/LQ dan DLQ.....	13
Tabel 3. 1 Daftar Indikator, Proxy dan Sumber Data Dari Modal Penghidupan	27
Tabel 4. 1 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Milliar Rupiah)....	31
Tabel 4. 2 Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha 2018-2022.....	35
Tabel 4. 3 Perhitungan LQ (Location Quotient) Kabupaten Gresik.....	36
Tabel 4. 4 Perhitungan LQ Dinamis Kabupaten Gresik.....	37
Tabel 4. 5 Perhitungan Klassen Kabupaten Gresik Tahun 2022.....	38
Tabel 4. 6 Kondisi Demografi Kabupaten Gresik Tahun 2022.....	40
Tabel 4. 7 Kondisi Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2022.....	41
Tabel 4. 8 Jumlah Tenaga Kerja Per Kecamatan Di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.....	42
Tabel 4. 9 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahana Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021.....	45
Tabel 4. 10 Hasil Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten Gresik.....	46
Tabel 5. 1 Korelasi Variabel Sosial-Ekonomi Dengan Ketimpangan Wilayah Di Kabupaten Gresik.....	53
Tabel 5. 2 Strategi Nawa Karsa Dalam Menurunkan Ketimpangan Antar Wilayah.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Kurva Lorenz	20
Gambar 2. 2	Kurva Indeks Gini	21
Gambar 4. 1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik, 2016-2021 ...	32
Gambar 4. 2	Peta PDRB Kabupaten Gresik 2015	34
Gambar 4. 3	Peta PDRB Kabupaten Gresik 2020	34
Gambar 4. 4	Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.....	43
Gambar 4. 5	Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Gresik.....	44
Gambar 4. 6	Peta Tingkat Kemiskinan Desa Kabupaten Gresik	45
Gambar 4. 7	Peta Tingkat Kemiskinan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2015 dan 2020.....	45
Gambar 4. 8	Peta Indeks Williamson Di Kabupaten Gresik Tahun 2015.....	46
Gambar 4. 9	Peta Indeks Williamson Di Kabupaten Gresik Tahun 2020.....	46
Gambar 5. 1	Hasil Estimasi Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Gresik.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Gresik merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dengan letak yang berbatasan dengan ibu kota Provinsi Jawa Timur, maka tidak heran bahwa Kabupaten Gresik mendapatkan limpahan ekonomi (*spillover effect*) dari Kota Surabaya. Sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik rata-rata tumbuh diatas 5% (lima persen) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama makroekonomi yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan penduduk disuatu wilayah atau negara. Dimana pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun tentu saja tujuan pembangunan daerah Kabupaten Gresik tidak hanya semata-mata terkait dengan peningkatan pendapatan masyarakat Gresik. Tetapi juga terkait pemerataan pendapatan dari seluruh masyarakat Gresik.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi di Kabupaten Gresik selain menciptakan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran yang ada di wilayah ini. Oleh karena itu , hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada.

Namun, terkadang hasil pembangunan belum merata dan masih terdapat ketimpangan antar daerah. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun yang membaik di Kabupaten Gresik ternyata masih terdapat permasalahan salah satunya terciptanya ketimpangan/disparitas pendapatan antar masyarakat di kabupaten Gresik yang ditunjukan dari Indeks Gini Kabupaten Gresik. Menurut BPS, Indeks gini adalah salah satu ukuran yang

digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Indeks Gini Kabupaten Gresik dalam 5 (lima) tahun kebelakan cenderung mengalami peningkatan. Indeks Gini Kabupaten Gresik pada tahun 2020 mencapai 0,3 yang artinya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Gresik sudah mulai berada di level tinggi. Namun indeks gini memiliki kelemahan yang mendasar tidak dapat mengukur di sektor atau wilayah mana di Kabupaten Gresik yang mengalami distribusi pendapatan dengan ketimpangan tertinggi.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik telah merubah pendekatan didalam pengukuran ketimpangan pendapatan dari basis pendapatan ke basis sektor dan wilayah. Hal ini sebagaimana tertuang didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 2021-2026 yang memasukkan Indeks Williamson sebagai indikator kinerja utama (IKU) Pemkab Gresik.

Sehingga Pemkab Gresik melakukan pengkajian apakah pembangunan ekonomi yang telah terjadi selama ini mampu menekan angka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan agar pembangunan ekonomi mampu secara nyata menekan angka kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan. sehingga tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai mengingat tujuan pembangunan bukan semata-mata kenaikan pertumbuhan ekonomi semata. namun juga memiliki dimensi lain yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan sebagai salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dalam kajian Perhitungan Indeks Williamson di Kabupaten Gresik antara lain :

- a) Menghitung Indeks Williamson untuk mendapatkan nilai dasar yang bisa dimasukkan kedalam IKU pada RPJMD;

- b) Mengukur dan memproyeksikan nilai indeks Williamson Kabupaten Gresik pada tahun 2022-2026;
- c) Mengukur dan menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Gresik;
- d) Mengukur dan menganalisis konsentrasi kemiskinan antar kecamatan di Kabupaten Gresik.

1.3 Manfaat

Kajian ini diharapkan dapat diketahui dan dianalisis kondisi makroekonomi Kabupaten Gresik yang dititikberatkan pada relevansinya dengan permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan dan ketimpangan kemiskinan antar kecamatan di wilayah Kabupaten Gresik. Dengan demikian akan diperoleh informasi yang lebih komprehensif dalam perbandingan kondisi ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan antar kecamatan di Kota Surakarta sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan kebijakan dan strategi guna mengatasi permasalahan tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kegiatan ini pada dasarnya menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

- a) Melakukan analisis kondisi makroekonomi Kabupaten Gresik yang dititikberatkan pada relevansinya dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.
- b) Melakukan pengukuran serta menganalisis tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten Gresik.
- c) Melakukan pengukuran serta menganalisis tingkat ketimpangan kemiskinan Kabupaten Gresik.
- d) Merumuskan usulan kebijakan dan strategi dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.

1.5 Keluaran Kajian

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan “Perhitungan Indeks Williamson di Kabupaten Gresik” adalah:



- a) Data dan informasi kondisi proxy PDRB pada masing-masing Kecamatan;
- b) Data dan informasi mengenai kondisi proxy tingkat kemiskinan pada masing-masing kecamatan;
- c) Data dan informasi mengenai nilai indeks Williamson di Kabupaten Gresik;
- d) Data proyeksi nilai indeks Williamson Kabupaten Gresik tahun 2022-2026.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi didalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Teori *economic base* menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi sektor industri di suatu daerah yang menggunakan sumberdaya produksi lokal, termasuk tenaga kerja, bahan baku, dan outputnya diekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan penciptaan peluang kerja (job creation) di daerah tersebut.

Ferroux dalam Mudrajat Kuncoro (2002) merupakan orang pertama mengemukakan konsep pusat pertumbuhan ekonomi {economic growth center}. Ferroux menyatakan pusat pertumbuhan ekonomi itu merupakan suatu tempat dalam suatu ruang atau suatu wilayah, darimana kekuatan-kekuatan sentrifugal memancar dan kemana kekuatan-kekuatan sentripental ditarik. Di dalam suatu proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi di seluruh wilayah secara serentak melainkan akan bekerja kearah pengelompokan aktivitas ekonomi yang akhirnya membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Setiap pusat pertumbuhan ekonomi akan mempunyai daerah penarikan dan daerah penolakan sampai batas tertentu, sehingga dalam suatu wilayah yang luas akan terbentuk gugusan-gugusan pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*) masingmasing. Konsep pusat pertumbuhan ekonomi ini sebagai suatu gugusan industri-industri, baik yang saling terkait maupun yang berdiri sendiri-sendiri, yang kemudian berkembang menjadi kota dan berlokasi pada suatu tempat tertentu dalam suatu wilayah.

Lincoln Arsyad (1999; 108) menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi suatu daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merancang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Menurut Syafrizal (1997; 35) untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, kebijaksanaan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Hal ini perlu diusahakan karena potensi pembangunan yang dihadapi oleh masing-masing daerah tentu sangat bervariasi. Karena itu, bila prioritas pembangunan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keadaan tersebut mengakibatkan meningkatnya ketimpangan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan nasional merupakan tolok ukur untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Peningkatan pendapatan nasional tentu akan berbeda dari tahun ke tahun. Dari pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diketahui sejauh mana pencapaian negara tersebut dari kegiatan ekonomi yang sudah dilakukannya dalam jangka pendek dan strategi-strategi yang akan disusun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Proses pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan dimana pada akhirnya terkendala oleh sumber daya alam yang ada dan terbatas. Pada akhirnya proses pertumbuhan itu sendiri akan mengalami perlambatan pada saat sumber daya alam tidak lagi tersedia untuk suatu aktivitas ekonomi yang harus terus berjalan sementara sumber daya yang ada sudah menipis bahkan lama kelamaan habis.

Tahap-tahap pembangunan tersebut terjadi dengan asumsi awal bahwa situasi pasar dimana tahapan tersebut berlangsung adalah pasar dimana didalamnya berlangsung persaingan secara alami yang dikenal dengan pasar persaingan sempurna. Adapun karakteristik pasar tersebut adalah:

Di dalamnya banyak pembeli serta penjual yang bertransaksi.



- 1) Barang yang ditawarkan jenisnya sama.
- 2) Masing-masing baik pembeli ataupun penjual tidak memiliki itikad buruk atau kerjasama yang merugikan.
- 3) Setiap unsur yang ada di dalam pasar tersebut memiliki bergerak secara cepat.
- 4) Situasi pasar dan segala seluk beluk mengenai kondisi pasar diketahui secara rinci baik oleh pembeli maupun penjual.

2.2.1 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi merupakan dua tujuan pembangunan yang seharusnya dapat dicapai secara bersamaan dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pemerataan ekonomi akan memperlebar jurang pemisah antara satu kelompok masyarakat dan kelompok lainnya, sementara pemerataan ekonomi tanpa pertumbuhan ekonomi sama halnya dengan meningkatkan kemiskinan suatu daerah. Pertumbuhan versus pemerataan terutama mengenai distribusi pendapatan menjadi hal yang paling diperhatikan oleh negara-negara berkembang karena dirasakan permasalahan ini sangatlah kompleks. Keduanya samasama penting, namun hampir selalu sulit diwujudkan dengan waktu yang bersamaan. Pengutamaan suatu hal akan menuntut dikorbankannya hal yang lain, begitu pula dengan dilema pertumbuhan dan pemerataan.

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Jadi, menurut ekonomi makro, pengertian pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan PDB yang berarti juga penambahan pendapatan nasional (Tambunan, 2001)

Beberapa negara di Asia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat pada era tahun 1970-an hingga tahun 1990-an yang ditandai dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. Karena pencapaiannya negara-negara tersebut dikategorikan sebagai High-Performing Asian Economies atau HPAEs (Negara-negara di Asia dengan pencapaian ekonomi tertinggi).

Negara-negara tersebut juga memiliki karakteristik khusus yang berbeda dibandingkan negara-negara berkembang yang lain, antara lain:

1. Output dan produktivitas pertanian meningkat sangat cepat.
2. Tingginya pertumbuhan ekspor manufaktur.
3. Pertumbuhan penduduk turun relatif cepat dan signifikan.
4. Tingginya pertumbuhan penyediaan barang-barang modal yang didorong oleh tabungan dalam negeri.
5. Tingginya tingkat inisiatif penduduk dan sumber daya manusia.
6. Tingginya tingkat produktivitas dari segala sektor.

2.2.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

2.2.2.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupun mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan. Menurut BPS penduduk berumur 15 keatas terbagi sebagai tenaga kerja dikatakan tenaga kerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu.

Pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan penduduk dapat dikatakan sebagai faktor positif yang akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Namun pertumbuhan tenaga kerja juga dapat memberikan dampak yang negatif. Hal ini akan terjadi bila sistem perekonomian

daerah tersebut tidak mampu menyerap secara produktif peningkatan tenaga kerja.

2.2.2.2 Angka Ketergantungan (Dependency Ratio)

Dependency ratio didefinisikan sebagai rasio antara kelompok penduduk umur 0-14 tahun yang termasuk dalam kelompok penduduk belum produktif secara ekonomis dan kelompok penduduk umur 65 tahun ke atas termasuk dalam kelompok penduduk yang tidak lagi produktif dengan kelompok penduduk umur 15-64 tahun termasuk dalam kelompok produktif. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dependency ratio dapat dihitung dengan cara berikut :

$$RK = \frac{P_{(0-14)} + P_{65+}}{P_{(15-64)}} \times 100 \dots\dots\dots(2.1)$$

RK : Rasio Ketergantungan

P(0-14) : Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun)

P65+ : Jumlah penduduk usia tua (65 tahun keatas)

P(15-64) : Jumlah penduduk usia produktif (15 – 54 tahun)

2.2.2.3 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Angka

pertumbuhan penduduk adalah tingkat pertambahan penduduk suatu wilayah atau negara dalam suatu jangka waktu tertentu, dinyatakan dalam persentase.

Di negara-negara maju pertumbuhan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatnya jumlah penduduk maka tenaga kerja akan meningkat dan pendapatan perkapita masyarakat akan meningkat pula. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM, teknologi, dan sebagainya. Sedangkan di negara-negara berkembang peningkatan jumlah penduduk merupakan bencana, karena tidak dibarengi dengan kualitas SDM yang dihasilkan sehingga dependency ratio yang harus ditanggung penduduk produktif semakin meningkat.

Menurut Malthus jumlah penduduk di suatu negara akan meningkat sangat cepat sesuai dengan deret ukur atau tingkat geometrik. Sementara, karena adanya proses pertambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung atau deret aritmatik. Karena pertumbuhan pengadaan pangan tidak dapat berpacu secara memadai dengan kecepatan pertumbuhan penduduk, maka pendapatan per kapita cenderung terus mengalami penurunan sampai sedemikian rendahnya sehingga segenap populasi harus bertahan pada kondisi sedikit di atas tingkat subsisten. Salah satu cara untuk mengatasi masalah rendahnya taraf hidup yang kronis tersebut adalah dengan "penanaman kesadaran moral" di kalangan segenap penduduk dan kesediaan untuk membatasi jumlah kelahiran. Jika pendapatan agregat dari suatu Negara meningkat lebih cepat maka pendapatan per kapita juga meningkat. Seandainya pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pada peningkatan pendapatan total, maka dengan sendirinya pendapatan per kapita akan menurun. Bila makin banyak penduduk maka saving dan investasi juga makin tinggi sehingga pendapatan per kapita meningkat. Namun jika terlalu banyak saving, pendapatan per kapita bisa menurun.

2.2.3 Penentuan Sektor Basis Dan Keunggulan Komparatif & Kompetitif Wilayah

1. Teori Sektor Potensial (Analisis Location Quotient)

Potensi ekonomi suatu daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan, sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat, bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko, 2002). Sektor potensial/unggulan harus mempunyai kelebihan, yaitu unggul secara kompetitif dan komparatif.

Terdapat ukuran pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya dapat menggambarkan hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya sebagai sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan, salah satunya dengan menggunakan Location Quotient (LQ) (Arsyad, 1999).

Dalam menentukan sektor unggulan dapat digunakan Analisis LQ. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk menentukan kegiatan basis dan bukan basis diantaranya adalah teknik LQ. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengukur basis ekonomi.

Metode Location Quotient (LQ) dibedakan menjadi dua yakni: static location quotient (SLQ atau LQ) dan dynamic location quotient (DLQ). Dasar penggunaan teknik LQ adalah teori ekonomi basis di mana ketika industri basis itu menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di daerah dan di luar daerah maka penjualan hasil ke luar daerah akan mendatangkan pendapatan ke daerah yang bersangkutan. Masuknya arus pendapatan akan menyebabkan naiknya konsumsi dan investasi sehingga pendapatan daerah dan kesempatan kerja ikut meningkat pada gilirannya.

Ada pun, rumus penghitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Budiharsono, 2001):

$$LQ = \frac{V_1^R/V^R}{V_1/V} \dots\dots\dots(2.2)$$

Dimana:

V_1^R : Nilai PDRB suatu sektor tingkat kabupaten;

V^R : Nilai PDRB seluruh sektor tingkat kabupaten;

V_1 : Nilai PDRB suatu sektor tingkat provinsi;

V : Nilai PDRB seluruh sektor tingkat provinsi.

Berdasarkan analisis location quotient (LQ), jika nilai $LQ > 1$ maka sektor tersebut menjadi basis atau merupakan sektor unggulan/potensial, produksi yang dihasilkan tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan akan tetapi juga dapat di ekspor keluar wilayah. Semakin nilai LQ lebih tinggi dari satu, semakin tinggi keunggulan komparatifnya (Cahyono, 2014). Sebaliknya jika nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut tergolong non basis, tidak memiliki keunggulan/non potensial, produksi sektor tersebut disuatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar. Jika nilai $LQ = 1$, sektor tersebut tergolong non basis, tidak memiliki keunggulan, produksi dari sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk di ekspor.

2. Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)

Perubahan perekonomian lokal pada kurun waktu tertentu dapat diuji melalui Dynamic Location Quotient (DLQ) sehingga perubahan sektoral dapat diketahui. DLQ merupakan bentuk modifikasi dari SLQ dengan mengakomodasi besarnya PDRB dari nilai produksi sektor atau sub sektor dari waktu ke waktu. Naik turunnya LQ dapat dilihat untuk sektor tertentu pada dimensi waktu yang berbeda dengan formulasi sebagai berikut (Nazipawati, 2007):

$$DLQ_{ij} = \frac{(1+g_{ij})/(1+g_j) = IPPS_{ij}}{(1+G_i)/(1+G) = IPPS_i} \dots\dots\dots (2.3)$$

Dimana:

DLQ_{ij} : Indeks potensi sektor i di tingkat kabupaten;

g_{ij} : Laju pertumbuhan nilai tambah sektor dan subsektor i di daerah studi;

g_j : Rata-rata laju pertumbuhan PDRB di tingkat kabupaten;

G_i : Laju pertumbuhan nilai tambah sektor dan subsektor i daerah referensi;

G : Rata-rata pertumbuhan PDRB daerah referensi.

Nilai DLQ yang dihasilkan jika lebih dari 1, maka potensi perkembangan sektor i di suatu daerah lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama dalam lingkup nasional. Sebaliknya, jika $DLQ < 1$, maka potensi perkembangan

sektor i di daerah lebih rendah jika dibanding nasional secara keseluruhan. Penggabungan antara nilai SLQ/LQ dan DLQ dapat dijadikan kriteria dalam menentukan apakah sektor ekonomi tergolong unggulan, prospektif, andalan, dan tertinggal. Adapun kriteria sebagai berikut (Suyatno, 2000) :

- a. Jika nilai LQ dan DLQ > 1 , berarti sektor tersebut akan tetap menjadi basis baik sekarang maupun di masa datang.
- b. Jika nilai LQ > 1 dan DLQ < 1 , itu artinya sektor tersebut akan bergeser dari sektor basis menjadi non basis di masa datang.
- c. Jika nilai LQ < 1 dan DLQ > 1 , maka sektor tersebut akan bergeser dari sektor non basis menjadi sektor basis di masa datang.
- d. Jika nilai LQ dan DLQ < 1 , maka sektor tersebut akan terus menjadi nonbasis baik saat ini maupun di masa datang.

Tabel 2. 1 Penggolongan Sektor Menurut SLQ/LQ dan DLQ

Kriteria	DLQ > 1	DLQ < 1
SLQ/LQ > 1	Unggulan	Prospektif
SLQ/LQ < 1	Andalan	Tertinggal

Sumber : Suyatno, 2000.

3. **Shift Share Analysis**

Dalam (Taringan, 2015:82) mengatakan bahwa analisis *Shift-Share* juga membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah kita dengan wilayah nasional. Akan tetapi metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ. Metode LQ tidak memberikan penjelasan metode atas faktor penyebab sedangkan metode *shift-share* memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur sektor (industri) suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya.

Analisis *Shift Share* adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional).

Menurut Prof. Sjafrizal (2005) dalam buku teks John P. Blair (1991) bentuk umum persamaan dari analisis *shift share* sebagai berikut:

$$\Delta y_i = \left[y_i \left(\frac{Y^t}{Y^0} - 1 \right) \right] + \left[y_i \left(\frac{Y^t}{Y^0} - \frac{y_i^t}{y_i^0} \right) \right] + \left[y_i \left(\frac{y_i^t}{y_i^0} - \frac{Y^t}{Y^0} \right) \right] \dots\dots\dots(2.4)$$

Dimana:

- Δy_i = Perubahan nilai tambah sektor i;
- Y^0_i = Nilai tambah sektor i di tingkat daerah pada tahun awal periode;
- Y^t_i = Nilai tambah sektor i di tingkat daerah pada akhir periode;
- Y^0^t = Nilai tambah sektor i di tingkat nasional pada tahun awal periode;
- Y^0_i = Nilai tambah sektor i di tingkat nasional pada tahun akhir periode;

Persamaan diatas menunjukkan bahwa peringkat nilai tambah suatu sektor di tingkat daerah dapat diuraikan (*decompose*) atas 3 bagian. Bagian pertama pada sisi kiri persamaan tersebut adalah:

1. *Regional Share* : $[y_i (Y^t / Y^0 - 1)]$ adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor luar yaitu: peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijakan nasional yang berlaku pada seluruh daerah.
2. *Proportionality Shift (Mixed Shift)* : $[y_i (y_i^t / y_i^0) - (Y^t / Y^0)]$ adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, yang berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat seperti sektor industri.
3. *Diferential Shift (Competitif Shift)* : $[y_i (y_i^t / y_i^0) - (Y^t / Y^0)]$ adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Unsur pertumbuhan inilah yang merupakan Keuntungan Kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah.

Sebagaimana halnya dengan model pertumbuhan ekonomi regional lainnya, analisis *shift-share* ini juga mempunyai beberapa kelemahan tertentu. Sebagaimana diungkapkan oleh Stimson, Robert, Roger R. Stough dan Brian H. Robert (2006), kelemahan tersebut antara lain adalah (Sjarizal, 2018):

1. Perubahan dalam struktur industri pada tingkat nasional juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional dan hal ini tidak

- diperhitungkan dalam analisis *shift-share*;
2. Hasil perhitungan analisis *shift-share* ini sangat sensitif terhadap waktu, tingkat pengelompokan sektor dan regional yang dilakukan;
 3. Analisis tidak dapat memberikan informasi tentang kemampuan regional bersangkutan dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi dimasa mendatang.

Untuk memperbaiki kelemahan tersebut, Stimson dkk. (2006), menyarankan untuk menggunakan pendekatan metode ekonometrik sebagaimana yang diusulkan oleh Emerson, *et al.* (1975) serta Berzeg dan Koran (1978). Model ekonometrik tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_{ij,t} = a + bi + (gj + dij) + e_{ijt} \dots \dots \dots (2.5)$$

Dimana:

- $Y_{ij,t}$ = Tingkat pertumbuhan dalam periode analisis
- A = Dampak pertumbuhan secara keseluruhan
- bi = pengaruh struktur industri (*proportionality shift*) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
- Gj = Pengaruh regional (*regional share*)
- Dij = Potensi khusus daerah (*differential shift*)
- $Gj + dij$ = Pengaruh daya saing daerah terhadap pertumbuhan.

Regresi untuk persamaan diatas dapat dilakukan dalam bentuk *cross-section* di mana daerah merupakan unit observasi (n). Untuk dapat melakukan regresi yang demikian, maka perhitungan *shift-share* harus dilakukan untuk masing-masing provinsi atau daerah. Untuk kasus Indonesia tentunya jumlah observasi adalah 34 provinsi, yaitu sesuai dengan provinsi. Di samping itu, regresi juga dapat dilakukan dalam bentuk *time series* untuk suatu provinsi atau daerah tertentu. Untuk dapat melakukan hal ini maka perhitungan *shift-share* harus dilakukan untuk setiap tahun sesuai dengan data yang tersedia. Bila jumlah data tersedia terbatas, dapat pula dilakukan gabungan antara metode *cross-section* dan *time series* (*Pooling Data System*). Melalui teknik analisis regresi ini akan dapdiketahui secara lebih tegas berikut tingkat signifikansi dari masing-masing variabel *shift-share* tersebut terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah.

2.3 Ketimpangan

Menurut Kuncoro (2006) menyatakan bahwa ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.

Menurut Sukirno (2006), pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Terdapat dua konsep pokok mengenai pengukuran distribusi pendapatan, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak (Sukirno, 2006). Sedangkan konsep ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (Sukirno, 2006).

Terdapat dua model ketimpangan yaitu teori menurut Harrod Domar dan teori menurut Neo-klasik. Kedua teori tersebut memberikan peranan khusus pada peranan modal yang dapat direpresentasikan dengan kegiatan investasi yang ditanamkan pada suatu daerah untuk menarik modal kedalam daerahnya. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kemampuan setiap daerah untuk tumbuh sekaligus akan menciptakan perbedaan dalam kemampuan menghasilkan pendapatan. Investasi dianggap lebih menguntungkan jika dialokasikan pada daerah yang mampu menghasilkan pengembalian (return) yang besar dalam jangka waktu yang relatif cepat. Mekanisme pasar justru akan menyebabkan ketidakmerataan, dimana daerah-daerah yang relatif maju akan bertumbuh semakin cepat sementara daerah yang kurang maju tingkat pertumbuhannya justru relatif lambat. Hal ini yang menyebabkan timbulnya ketimpangan

pendapatan antar daerah, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam mengarahkan alokasi investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang di seluruh wilayah dalam negara (Sjafrizal, 2012).

Menurut Myrdal (1997), terjadinya ketimpangan regional disebabkan oleh besarnya pengaruh dari backwash effect dibandingkan dengan spread effect di negara-negara terbelakang. Perpindahan modal cenderung meningkatkan ketimpangan regional, permintaan yang meningkat ke wilayah maju akan merangsang investasi dan akan meningkatkan pendapatan.

2.3.1 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan dan Cara Mengukur Ketimpangan Antar Wilayah

Faktor Penyebab Distribusi Pendapatan Tidak Merata (ketimpangan distribusi pendapatan). Ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan distribusi di Negara Sedang Berkembang :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal kerja tambahan besar dibandingkan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar bagi negara-negara sedang berkemabang dalam perdagangan dengan negara- negara maju, sebagi akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor NSB
8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Terdapat beberapa cara dalam menentukan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ukuran dari ketimpangan tersebut dapat digunakan sebagai acuan maupun visi bagi pemerintah daerah untuk dapat menentukan kebijakan pembangunan pada daerah atau wilayah tersebut. Terdapat dua indeks yang sering digunakan dalam penelitian antara lain:

1. Indeks Williamson

Dalam penentuan ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah pertama kali ialah williamson indeks di mana studi ini dilakukan pada tahun 1966 oleh Jeffrey G. Williamson. Secara statistik indeks ini sebenarnya adalah coefficient of variation yang secara lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Williamson menggunakan teknik ini dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar daerah. Indeks ini memiliki kelemahan di mana memiliki tingkat sensitifitas tinggi terhadap definisi wilayah yang digunakan pada perhitungan. Walaupun demikian Indeks ini dinilai cukup lazim untuk digunakan dalam mengukur ketimpangan antar wilayah. Williamson Index menggunakan data PDRB per kapita sebagai data dasar. Hal ini digunakan untuk menghitung tingkat pembangunan antar wilayah dan tingkat kemakmuran antar kelompok dalamnya.

Tingkat ketimpangan antar wilayah dapat diketahui dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson yaitu merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah atau disparitas pendapatan di suatu wilayah. Menurut Sjafrizal (2008:107).

$$IW = \sqrt{\frac{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}{Y}} \dots \dots \dots (2.6)$$

Dimana:

- Y_i = PDRB per kapita daerah i
- Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah
- f_i = Jumlah penduduk daerah i
- N = Jumlah penduduk seluruh daerah

Indeks Williamson mempunyai nilai antara 0-1, dimana semakin mendekati nol artinya maka menunjukkan wilayah tersebut semakin tidak timpang, dan apabila mendekati satu maka wilayah tersebut semakin timpang.

2. Indeks Theil

Indeks lain yang biasanya digunakan oleh peneliti dalam mengukur tingkat ketimpangan antar wilayah adalah Theil Index. Sama dengan Indeks Williamson dalam perhitungannya Indeks Theil menggunakan PDRB per kapita sebagai satuan hitung dan jumlah penduduk. Indeks Theil memiliki beberapa kelebihan dalam penggunaannya. Yang pertama, cakupan analisa dapat lebih luas. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan Indeks Theil digunakan untuk menghitung ketimpangan dalam daerah maupun antar daerah sekaligus. Yang kedua, penggunaan indeks ini dapat menghitung besar kontribusi pembangunan suatu wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan visi pada kebijakan pembangunan daerah.

Menurut Ying (2000) untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto provinsi, menggunakan Entropi Theil. Indeks Entropi Theil tersebut dapat dibagi/diurai menjadi dua subindikasi, yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional. Sedangkan formulasi Indeks Entropi Theil tersebut sebagai berikut:

$$I(y) = \sum (y_j/Y) x \log[(y_i/Y)/(x_j/X)] \dots \dots \dots (2.7)$$

Dimana:

- I(y) = Indeks Entropi Theil
- y_j = PDRB per kapita Kabupaten/Kota j
- Y = Rata-rata PDRB per kapita Provinsi
- x_j = Jumlah penduduk Kabupaten/Kota j
- X = Jumlah Penduduk Provinsi

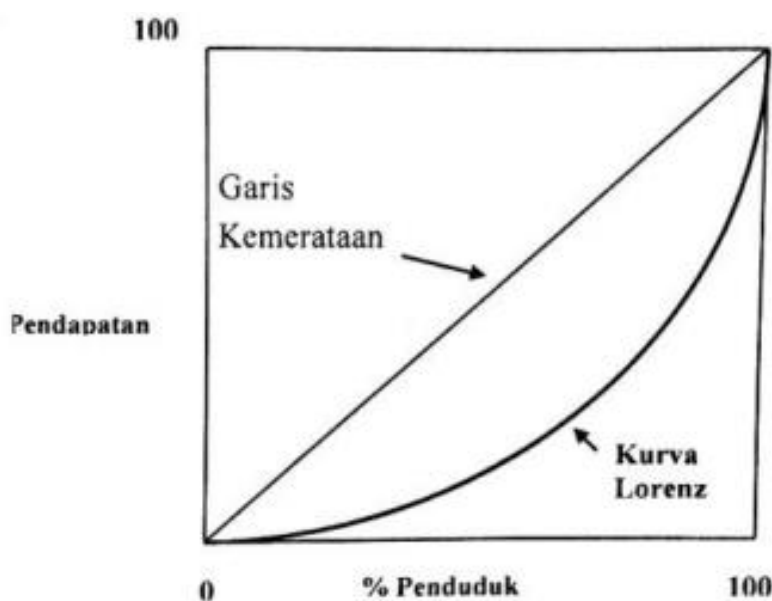
Kelebihan indeks wiliamson lebih mudah dan praktir untuk mengukur ketimpangan antar daerah. Namun terdapat kelemahan indeks Williamson adalah sensitive terhadap definisi wilayah yang digunkan dalam perhitungan. Sedangkan, kelebihan dari indeks entropi theil yang pertama adalah indeks ini menghitung ketimpangan dalam daerah dan antar daerah secara sekaligus,

sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas, yang kedua adalah indeks ini dapat pula dihitung kontribusi (dalam presentase) masing-masing daerah kerimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting.

3. Kurva Lorenz

Merupakan metode yang biasa dipakai untuk menganalisis statistik pendapatan perorangan. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara presentase jumlah penduduk penerima pendapatan tertentu dari total penduduk dengan presentase pendapatan yang benar-benar mereka peroleh dari total pendapatan, misalnya selama satu tahun. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal (garis pemerataan sempurna) maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya.

Oleh karena itu tidak ada suatu negarapun yang mengalami pemerataan sempurna ataupun ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatannya, maka kurva-kurva Lorenz untuk setiap negara akan terletak di sebelah kanan kurva diagonal tersebut, seperti gambar 1.1. Semakin tinggi derajat ketidakmerataannya, maka kurva Lorenz tersebut juga akan semakin melengkung (cembung) dan semakin mendekati sumbu horizontal sebelah bawah (Arsyad, 2010).



Sumber: Arsyad, 2010

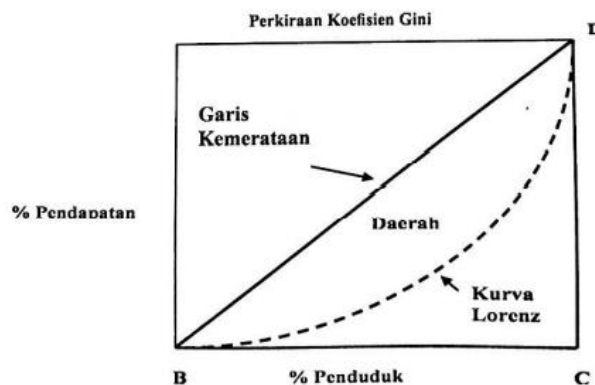
Gambar 2. 1 Kurva Lorenz

4. Indeks Gini

Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistikus Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 (International NGO Forum on Indonesia Development, 2018). Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna (Todaro dan Smith, 2006). Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks Gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara.

Suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara dapat diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (pemerataan sempurna) dengan Kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana kurva Lorenz tersebut berada (Arsyad, 2010).

Pada kurva di bawah koefisien gini ditunjukkan oleh perbandingan A (yang dilingkupi garis pemerataan sempurna dan kurva Lorenz) dengan luas segitiga BCD.



Sumber: Arsyad, 2010

Gambar 2. 2 Kurva Indeks Gini

Secara matematis rumus koefisien Gini dapat disajikan sebagai berikut:

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i)(Y_i + Y_{i+1}) \dots \dots \dots (2.8)$$

atau

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n f_i(Y_{i+1} - Y_i) \dots \dots \dots (2.9)$$

Dimana:

KG = Angka Koefisien Gini

X_i = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i

f_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

Koefisien Gini ini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Koefisien Gini dari negara-negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0,50-0,70; ketidakmerataan sedang berkisar 0,36-0,49; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20-0,35 (Arsyad, 2010).

2.4 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah (Raswita & Made, 2013).

Hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi adalah topik ekonomi pembangunan dan isu pemerintahan yang menarik di negara berkembang. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan yang erat antara kedua variabel ini dalam kehidupan masyarakat dan stabilitas sosial (Das et al, 2014 dan Dewanto et al, 2014).

Ketimpangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda, oleh karena itu tidaklah mengherankan bilamana pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju

(*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat secara vertikal yakni perbedaan pada distribusi pendapatan serta secara horizontal yakni perbedaan antara daerah maju dan terbelakang (Sjafrizal, 2008).

Kuznets (1995) menemukan bahwa ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perbedaan pendapatan berupa kurva berbentuk "U-terbalik" yaitu proses pertumbuhan melalui perluasan sektor modern yang pada awalnya mengakibatkan peningkatan perbedaan pendapatan di antara rumah tangga, kemudian mencapai tingkat pendapatan rata-rata tertentu dan akhirnya mulai menurun. Selain faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik ada dua faktor penting yang mempengaruhi pola tersebut, yaitu terpusatnya modal pada kelompok pendapatan tinggi dan pergeseran penduduk dari sektor pertanian tradisional menuju sektor industri modern (Sutarno, 2002).

Djodjohadikusumo (1994) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses transformasi yang ditandai oleh perubahan struktur perekonomian, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian antara perubahan struktur dan pertumbuhan memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Indeks Williamson berbicara tentang ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Secara luas, Apabila angka indeks kesenjangan Williamson semakin mendekati nol, maka menunjukkan kesenjangan yang semakin kecil dan bila angka indeks menunjukkan semakin mendekati satu maka menunjukkan kesenjangan yang makin melebar. Matolla dalam Puspandika (2007) menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah kesenjangan ada pada kesenjangan level rendah, sedang, atau tinggi. Dari angka tersebut, akan tercirikan seberapa berhasilnya pembangunan daerah di suatu wilayah, sehingga nantinya dievaluasi dalam perencanaan pembangunan selanjutnya.

Dalam penentuan ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah pertama kali ialah williamson indeks di mana studi ini dilakukan pada tahun 1966 oleh Jeffrey G. Wiliamson. Secara statistik indeks ini sebenarnya adalah coefficient of variation yang secara lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Williamson menggunakan teknik ini dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar daerah. Indeks ini memiliki kelemahan di mana memiliki tingkat sensitifitas tinggi terhadap definisi wilayah yang digunakan pada perhitungan. Walaupun demikian Indeks ini dinilai cukup lazim untuk digunakan dalam mengukur ketimpangan antar wilayah. Williamson Index menggunakan data PDRB per kapita sebagai data dasar. Hal ini digunakan untuk menghitung tingkat pembangunan antar wilayah dan tingkat kemakmuran antar kelompok dalamnya.

BAB III

METODOLOGI KAJIAN

3.1 Metode Kajian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan rasionalistik positivistik. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian ini disajikan dengan bentuk analisis deskriptif kuantitatif. Unit amatan penelitian ini meliputi variabel terikat yaitu disparitas wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson, dan variabel bebas yaitu faktor-faktor yang secara teori mempengaruhi disparitas wilayah. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi 18 (delapan belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor dalam kesatuan modal penghidupan yang secara signifikan menentukan ketimpangan di wilayah di Kabupaten Gresik, studi ini memanfaatkan data-data sekunder untuk menyusun variable-variabel penelitian yang akan digunakan. Variabel penelitian adalah atribut atau sifat dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004). Sedangkan, definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasionalisasi.

Ketimpangan kesejahteraan antar wilayah dapat dilihat melalui data indeks Williamsom. Data ini bersumber dari survei sosial ekonomi nasional (Susenas) dan pendataan potensi desa (Podes) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks Williamson bernilai antara 0 dan 1. Nilai yang lebih rendah menunjukkan ketimpangan ekonomi antar wilayah yang lebih rendah, dan sebaliknya. Berikut adalah rumus penghitungan indeks Williamson:

$$IW_{Gresik_t} = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - Y)^2 \left(\frac{P_i}{N}\right)}{Y}} \dots\dots\dots (3.10)$$

Dengan IW_{gresik} adalah nilai Indeks Williamson Kabupaten Gresik. Kemudian Y_i adalah PDRB per Kecamatan Kabupaten Gresik. Y adalah PDRB

Kabupaten Gresik. P_i adalah jumlah penduduk untuk tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Gresik. N adalah jumlah penduduk Kabupaten Gresik. Dalam studi ini, Y_i diperoleh dari hasil estimasi $\ln \ln \widetilde{Y}_{ch}$ dalam simulasi menggunakan model estimasi wilayah kecil (*small area estimation*) atau SAE (Elbers, Lanjouw, dan Lanjouw, 2003), seperti yang terlihat pada persamaan berikut:

$$\widetilde{Y}_{ch} = X_{ch}\beta + \mu_{ch} \dots \dots \dots (3.11)$$

Adapun kriteria interpretasi dari nilai Indeks Williamson sebagai berikut:

- Apabila nilai $IW_{gresik} < 0,35$ maka kesenjangan yang terjadi adalah rendah;
- Apabila nilai $IW_{gresik} \quad 0,35 \leq IW_{gresik} \leq 0,5$ maka kesenjangan yang terjadi sedang;
- Apabila nilai $IW_{gresik} \quad IW > 0,5$ maka kesenjangan yang terjadi tinggi.

Setelah dilakukan penentuan tingkat kesenjangan wilayah yang terjadi di setiap kecamatan, kemudian dilakukan pengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat kesenjangan menjadi wilayah dengan kesenjangan rendah, wilayah dengan kesenjangan sedang dan wilayah dengan kesenjangan tinggi.

Selanjutnya terdapat 5 (lima) indikator yang menunjukkan indikator modal penghidupan di masing-masing wilayah Kecamatan Kabupaten Gresik yang disinyalir berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah. Dari kelima indikator tersebut kemudian didetailkan kedalam beberapa proksi. Informasi mengenai modal penghidupan di kecamatan diperoleh dari data Podes dan data sensus penduduk. Data Podes yang digunakan adalah data Podes 2015 sampai 2020. Sementara itu, data sensus penduduk yang digunakan adalah data Sensus Penduduk 2010. Detail indikator untuk setiap modal penghidupan beserta sumber datanya tersedia pada **Tabel 3.1** berikut :

Tabel 3. 1 Daftar Indikator, Proxy dan Sumber Data Dari Modal Penghidupan

Variabel	Proksi	Sumber Data
SDM	Rata-rata lama sekolah	Sensus penduduk 2010
	Tingkat kemiskinan	Susenas, 2015-2020
Modal Fisik	Ketersedian saluran irigasi	Podes 2015-2020
	% Jalan terluas yang sudah beraspal di Kecamatan	Podes 2015-2020
	Jumlah Fasilitas Kesehatan	Podes 2015-2020
	Jumlah Fasilitas Sekolah	Podes 2015-2020
Modal Keuangan	Ketersediaan Koperasi	Podes 2015-2020
	Ketersediaan Bank	Podes 2015-2020
	Ketersediaan Pasar Permanen	Podes 2015-2020
	Ketersediaan Kompleks Pertokoan	Podes 2015-2020
Modal Sosial	Banyaknya jenis kriminalitas yang terjadi	Podes 2015-2020
	Banyaknya jenis upaya masyarakat menjaga keamanan lingkungan	Podes 2015-2020
	Adanya kegiatan kerja bakti/gotong royong	Podes 2015-2020
Sumber Daya Alam	Banyaknya jenis pencemaran yang terjadi	Podes 2015-2020
	Cakupan rumah tangga dengan akses air minum layak	Podes 2015-2020

3.3 Model Analisis

Dalam studi ini akan menerapkan analisis inferensial untuk menguji secara statistic faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan tingkat ketimpangan antar wilayah. Hal ini dilakukan dengan menggunakan model panel berikut :

$$IW_{gresik_{it}} = \alpha_0 + \beta_1 Z_{it} + \mu_i + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.12)$$

IWgresik adalah indeks Wiliamson yang menunjukkan tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Gresik. Sebagai variable dependen, penyebab ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Gresik melalui serangkaian variable independent Zit yang tergabung dalam kerangka variable SDM, modal fisik, modal keuangan, modal sosial dan sumber daya alam.

Setiap variabel dijelaskan dengan beberapa indikator seperti dijelaskan pada tabel 3.1. Arah dan kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen ditunjukkan oleh tanda dan besaran koefisien α dan β yang mengikuti setiap variabel. Koefisien α dan β merupakan sebuah estimator yang didapatkan dari proses estimasi nilai parameter berdasarkan informasi yang tersedia pada data sampel. Sementara itu, faktor keragaman karakteristik kecamatan yang tetap antarwaktu, μ_i dan faktor yang mungkin terjadi di kecamatan tetapi berubah antar waktu, ε_t merupakan komponen galat (*error term*). Dimana faktor-faktor tersebut tidak bisa ditangkap didalam model namun turut serta menentukan tingkat ketimpangan antar wilayah.

Model ekonometri tersebut memiliki sejumlah permasalahan yang menyebabkan hasil estimasi tidak akurat, yaitu adanya variabel yang tidak diperhitungkan (*omitted variable bias*) dan adanya kesalahan pengukuran (*measurement error*). Permasalahan-permasalahan tersebut akan memperbesar nilai μ_i . Akibat keterbatasan data, model ini tidak bisa menangkap variabel lain yang turut menentukan tingkat ketimpangan. Keterbatasan data ini dapat bersumber dari dalam wilayah, seperti kelembagaan desa atau struktur politik masyarakat, atau dari supradesa, seperti kebijakan atau pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi atau nasional. Variabel-variabel tersebut, selain dapat berkorelasi dengan ketimpangan sebagai variabel dependen, dapat berkorelasi dengan variabel independen. Selain itu, beberapa variabel yang bersumber dari data Podes merupakan hasil pelaporan oleh kepala desa. Beberapa laporan, seperti laporan kejadian kriminalitas atau malnutrisi, rentan terhadap kesalahan pengukuran.

Permasalahan dalam spesifikasi model tersebut diatasi dengan menerapkan model perbedaan pertama (*first-difference*). Dengan kata lain,

estimasi dilakukan dengan menggunakan selisih nilai di setiap variabel dependen dan independen antara 2015 dan 2020. Berikut adalah model *first difference*:

$$IW_{gresik_{it}} - IW_{gresik_{it-1}} = \beta_1(Z_{it} - Z_{it-1}) + (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}) \dots \dots \dots (3.13)$$

Model *first difference* lebih bisa menutupi kelemahan pada persamaan (11) dengan melihat pengaruh variable independent pada proses perubahan variable dependen. Selain itu, dengan menggunakan estimasi *first difference*, heterogenitas wilayah yang tertangkap oleh μ_i tereliminasi dan menyisakan faktor-faktor yang berubah antarwaktu, ε_t . Namun untuk intepretasi modelnya, sama dengan estimasi kuadrat terkecil biasa (*ordinary least square*, OLS), yaitu setiap kenaikan satu unit variabel independen (X) akan berpengaruh pada variabel dependen (GINI) sebesar nilai estimator.

Selanjutnya untuk menguji kevalidtan dari model 3.3 dan 3.4 maka dilakukan tes heterogenitas (*heterogeneity test*) dan uji ketegaran (*robustness check*) dilakukan. Tujuan tes heterogenitas dalam studi ini adalah melihat variasi temuan berdasarkan karakteristik wilayah dan karakteristik perubahan tipologi kehidupan utama masyarakat di suatu wilayah. Sementara itu, *robustness check* perlu dilakukan mengingat indeks Williamson sebagai variabel dependen dalam model ini tidak didapatkan dari penghitungan langsung, melainkan dari estimasi melalui model SAE. Oleh karena itu, metode *bootstrap* diterapkan untuk mendapatkan hasil estimasi determinan ketimpangan desa yang lebih akurat, yaitu estimasi yang makin mendekati nilai parameternya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Perkembangan Ekonomi Wilayah Kabupaten Gresik

Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9. Ekonomi Indonesia tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen dibandingkan capaian pada tahun 2021 sebesar 3,70 persen. Selama tahun 2022 kelompok provinsi di Pulau Jawa mewarnai struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 56,48 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 5,31 persen. Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi terhadap perekonomian Pulau Jawa sebesar 25,51 persen dengan pertumbuhan ekonomi 5,58 persen pada Triwulan III-2022.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur triwulan III-2022 dibandingkan triwulan II-2022 mengalami peningkatan sebesar 2,15 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi yang tumbuh sebesar 7,98 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 8,54 persen. Ekonomi Jawa Timur sampai dengan Triwulan III-2022 meningkat sebesar 5,53 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 22,97 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 13,53 persen.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam satu periode tertentu adalah melalui data Produk Domestik Regional (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.



Perbandingan perekonomian Kabupaten Gresik dengan Wilayah lain di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

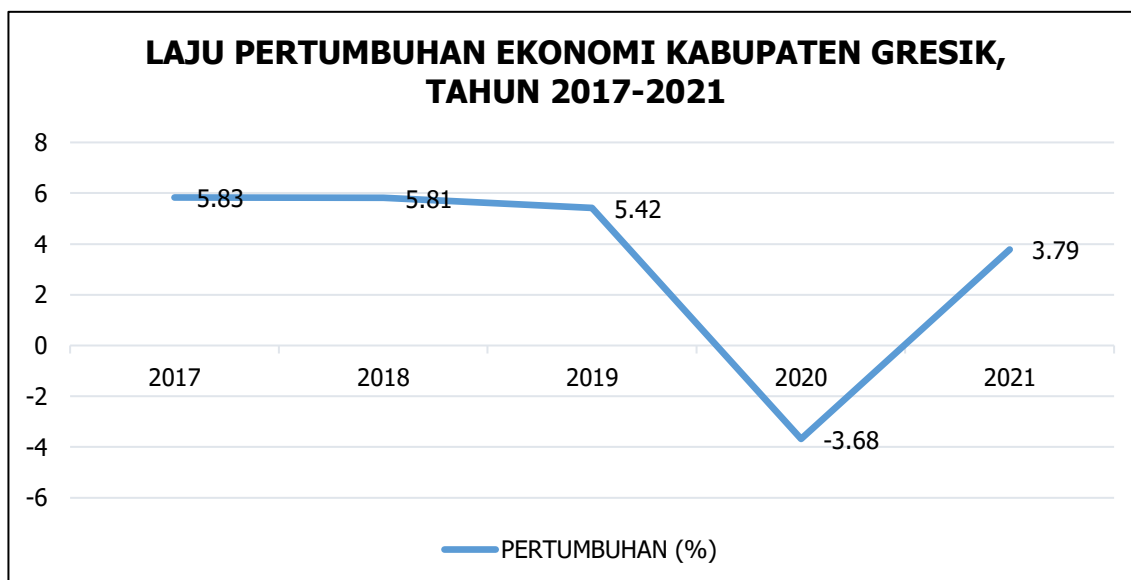
Tabel 4. 1 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Milliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Bangkalan	17,618.6	18,361.4	18,550.8	17,514.6	17,152.78
Kabupaten Banyuwangi	49,480.4	52,367.7	55,274.0	53,295.1	55,471.05
Kabupaten Blitar	23,107.5	24,286.2	25,530.1	24,945.5	25,700.0
Kabupaten Bojonegoro	63,046.5	65,815.6	69,985.7	69,703.4	65,839.5
Kabupaten Bondowoso	12,325.7	12,951.5	13,637.4	13,451.8	13,921.7
Kabupaten Gresik	90,855.6	96,131.6	1,01,346.5	97,616.6	1,01,318.7
Kabupaten Jember	48,913.0	51,370.5	54,200.0	52,586.6	54,688.7
Kabupaten Jombang	25,497.0	26,846.1	28,216.2	27,657.6	28,553.5
Kabupaten Kediri	26,446.2	27,786.4	29,193.7	28,491.0	29,361.7
Kabupaten Lamongan	24,923.0	26,279.8	27,706.2	26,972.7	27,896.5
Kabupaten Lumajang	20,542.9	21,569.8	22,563.4	21,933.8	22,623.4
Kabupaten Madiun	11,879.3	12,485.0	13,161.8	12,939.6	13,372.3
Kabupaten Magetan	11,978.1	12,602.6	13,237.5	13,020.9	13,417.0
Kabupaten Malang	61,408.9	64,819.0	68,379.7	66,545.5	68,619.1
Kabupaten Mojokerto	52,187.8	55,256.6	58,467.1	57,818.4	60,198.7
Kabupaten Nganjuk	16,485.6	17,373.3	18,304.2	17,990.4	18,640.7
Kabupaten Ngawi	12,406.4	13,052.3	13,710.9	13,479.7	13,823.5
Kabupaten Pacitan	9,962.5	10,507.4	11,040.8	10,837.9	11,107.40
Kabupaten Pamekasan	10,310.2	10,872.9	11,407.4	11,117.6	11,496.24
Kabupaten Pasuruan	94,102.0	99,489.4	1,05,289.2	1,03,152.8	1,07,630.27
Kabupaten Ponorogo	12,933.4	13,615.2	14,297.1	14,168.6	14,620.00
Kabupaten Probolinggo	21,418.2	22,374.6	23,395.3	22,898.2	23,664.4
Kabupaten Sampang	13,198.5	13,741.0	13,994.8	13,953.7	13,984.6
Kabupaten Sidoarjo	1,25,039.1	1,32,552.9	1,40,492.9	1,35,305.3	1,41,000.4
Kabupaten Situbondo	12,230.5	12,897.9	13,599.6	13,282.8	13,715.8
Kabupaten Sumenep	22,949.7	23,783.3	23,816.4	23,546.5	24,161.4
Kabupaten Trenggalek	11,579.9	12,161.9	12,779.5	12,502.4	12,959.0
Kabupaten Tuban	41,027.7	43,139.7	45,356.1	42,705.0	42,705.0
Kabupaten Tulungagung	24,637.4	25,920.2	27,299.8	26,455.8	27,390.4
Kota Blitar	4,315.0	4,566.2	4,832.9	4,722.6	4,924.6
Kota Kediri	80,946.2	85,337.7	90,001.5	84,375.0	86,485.6
Kota Madiun	9,486.1	10,051.3	10,623.1	10,262.4	10,748.1
Kota Malang	46,824.8	49,500.8	52,334.8	51,154.5	53,309.7
Kota Mojokerto	4,460.4	4,718.9	4,985.7	4,801.5	4,976.5
Kota Pasuruan	5,354.1	5,650.5	5,964.7	5,706.6	5,914.6
Kota Probolinggo	7,430.6	7,871.4	8,338.8	8,035.3	8,361.1
Kota Surabaya	3,64,714.8	3,87,303.9	4,10,879.3	3,90,936.4	4,07,726.8
Kota Batu	10,390.8	11,066.0	11,786.6	11,025.8	11,471.4
PDRB 38 kabupaten/kota	14,92,023.6	15,75,412.5	16,62,194.9	16,05,884.1	16,57,480.6
PDRB Jatim	14,82,299.58	15,63,441.82	16,49,895.64	16,11,507.78	16,69,116.89

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pada **tabel 4.1** dijelaskan bahwa pada tahun 2018 PDRB Kabupaten Gresik adalah sebesar 90,855.6, pada tahun 2019 sebesar 96,131.6, tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,01,346.5 namun pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Gresik mengalami penurunan menjadi 97,616.6. Pada tahun 2022 PDRB Kabupaten Gresik mengalami kenaikan kembali sebesar 1,01,318.7. Jika dibandingkan dengan wilayah lain yaitu daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik, seperti Kabupaten Mojokerto, maka Kabupaten Gresik memiliki pertumbuhan ekonomi lebih unggul dari pada Kabupaten Mojokerto namun bila dibandingkan dengan Kota Surabaya, Kabupaten Gresik tingkat pertumbuhan ekonomi jauh lebih rendah.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi secara tidak langsung untuk menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya adalah syarat utama untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi regional. Karena pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan berarti kebutuhan ekonomi juga meningkat sehingga dibutuhkan tambahan setiap tahunnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Gresik

Gambar 4. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik, 2017-2021

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten gresik pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik sebesar 5,83 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 5,81 lalu mengalami penurunan lagi pada

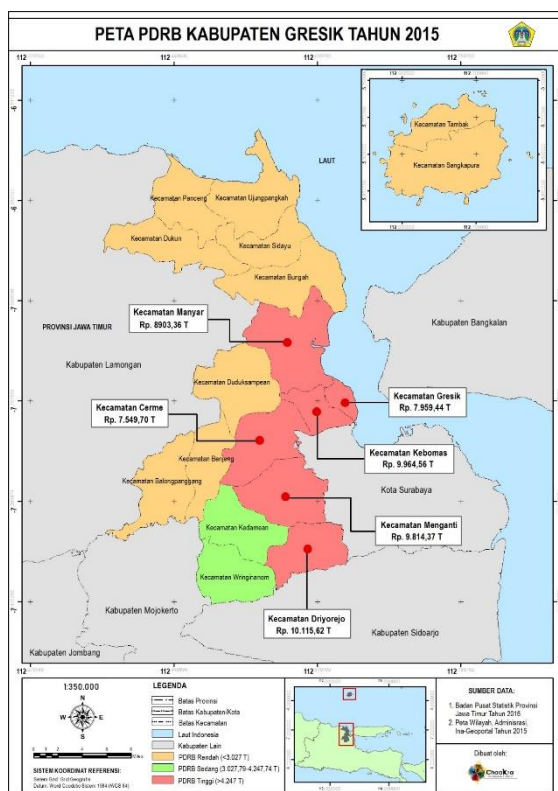
tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 5,42 dan pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik turun drastis hingga -3,68. Salah satu faktor yang mendominasi penurunan kegiatan ekonomi yaitu adanya pandemi Covid-19 yang berdampak langsung pada perekonomian, tidak hanya di Kabupaten Gresik tetapi juga perekonomian secara global. Adapun sektor yang justru mengalami pertumbuhan pada tahun 2020 yaitu sektor Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh potensi sektor komoditas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Setiap wilayah perlu melihat sektor komoditi yang berpotensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki *comparative advantage* untuk dikembangkan. Kebutuhan yang sama sektor dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat memproduksi dalam waktu yang relatif singkat dan volume sumbang untuk perekonomian juga cukup besar.

4.1.1 Perkembangan Sektoral PDRB Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan salah satu penopang perekonomian Kota Surabaya bersama dengan Kabupaten Sidoarjo. UKM Kabupaten Gresik merupakan UKM tertinggi di Jawa Timur, hal ini berarti bahwa biaya hidup lebih besar yang ditanggung oleh masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan peranan dari setiap sektor pembentuk PDRB sangat diperlukan.

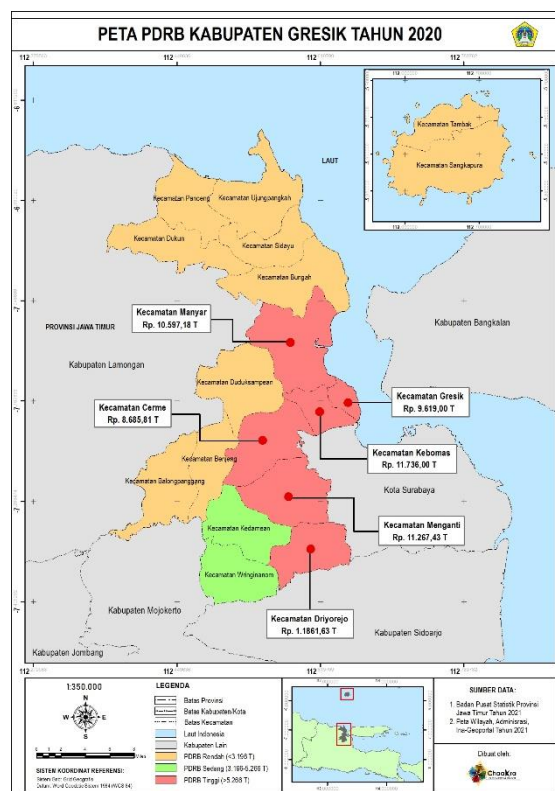
A



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Gambar 4. 2 Peta PDRB Kabupaten Gresik 2015

B



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2020

Gambar 4. 3 Peta PDRB Kabupaten Gresik 2020

Dampak dari aglomerasi bagi sektoral industri adalah, mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan, karena terjadi pemusatan kegiatan sehingga memudahkan dalam penanganannya. Mengurangi kemacetan diperkotaan, karena lokasinya dapat disiapkan di sekitar pinggiran kota. Dalam dua perbandingan data Peta PDRB Provinsi Kabupaten Gresik tahun 2015 dan Peta PDRB Kabupaten Gresik tahun 2020 tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan, hal ini dikarenakan pada tahun 2015 sektoral unggulan dalam bidang industri kian berkembang, sehingga pada tahun 2020 sektor potensi unggulan Kabupaten mengalami kenaikan.

Nilai PDRB Kabupaten Gresik tahun 2015 mengalami kenaikan pada tahun 2020. Misalnya pada Kecamatan Manyar total PDRB adalah Rp. 8903,36 T dan pada tahun 2020 total PDRB Kecamatan Manyar sebesar Rp. 10.597,18 T. Terjadinya kenaikan PDRB mengindikasikan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat



mengindikasikan baiknya keadaan ekonomi di wilayah tersebut. Data PDRB dan pertumbuhan Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.030,0	6.053,9	6.004,1	5.823,54	6.007,94
B	Pertambangan dan Penggalian	9.895,8	9.844,4	8.582,8	8.705,94	9.385,49
C	Industri Pengolahan	45.840,6	48.340,4	47.703,9	49.808,94	54.162,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	519,1	544,3	543,7	556,66	590,75
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	58,2	61,8	64,1	70,67	73,15
F	Konstruksi	9.072,4	9.893,3	9.234,8	9.418,46	9.929,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	12.002,4	12.805,9	11.509,2	12.342,99	13.245,02
H	Transportasi dan Pergudangan	2.089,5	2.337,4	2.209,9	2.284,80	2.603,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.183,4	1.281,9	1.159,0	1.209,20	1.317,23
J	Informasi dan Komunikasi	4.304,8	4.722,8	5.113,9	5.470,63	5.687,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 039,8	1 084,2	1.075,7	1.079,42	1.102,43
L	Real Estat	1.263,1	1.362,9	1.383,9	1.445,48	1.527,52
M,N	Jasa Perusahaan	268,0	285,3	290,8	297,42	312,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.094,0	1.136,2	1.131,7	1.140,31	1.144,45
P	Jasa Pendidikan	822,1	891,6	916,6	937,05	939,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	375,9	405,5	441,9	462,55	452,58
R,S,T,U	Jasa Lainnya	272,4	294,9	250,8	264,62	314,89
Produk Domestik Regional Bruto		96.131,6	101.346,5	97.616,6	101.318,69	108.796,88

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Gresik 2022.

Terdapat ukuran pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya dapat menggambarkan hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya sebagai sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

bersangkutan, salah satunya dengan menggunakan Location Quotient (LQ) (Arsyad, 1999).

Dalam menentukan sektor unggulan dapat digunakan Analisis LQ. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk menentukan kegiatan basis dan bukan basis diantaranya adalah teknik LQ. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengukur basis ekonomi. Perhitungan nilai Location Quotient (LQ) Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Perhitungan LQ (Location Quotient) Kabupaten Gresik

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata LQ	Keterangan
1	Pertanian	0,59	0,61	0,61	0,61	0,59	0,60	NON Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	2,01	1,96	1,99	1,95	1,75	1,93	Basis
3	Industri Pengolahan	1,64	1,64	1,63	1,61	1,60	1,62	Basis
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,45	1,49	1,59	1,64	1,63	1,56	Basis
5	Konstruksi	0,98	0,92	0,95	0,98	1,09	0,98	NON Basis
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,57	0,58	0,58	0,59	0,56	0,57	NON Basis
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0,74	0,75	0,77	0,80	0,80	0,78	NON Basis
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,51	0,52	0,32	0,33	0,54	0,44	NON Basis
9	Jasa-jasa	0,38	0,39	0,40	0,40	0,40	0,39	NON Basis

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Dari **tabel 4.3** perhitungan nilai LQ pada Kabupaten Gresik yaitu sebagai berikut, untuk kategori basis pada Kabupaten Gresik adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, dan Penggandaan Listrik, Gas dan air bersih. Dan untuk kategori non basis yaitu pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasai Mobil, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Pergudangan, pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan , Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya. Kategori ini ditentukan oleh LQ dengan keterangan untuk rata-rata LQ < 1 adalah sektor non basis dan LQ > 1 adalah sektor basis. Sektor Basis seperti Pertambangan dan Penggalian, Industri

Pengolahan, dan Penggandaan Listrik Gas dan Air Bersih tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan, hal ini dikarenakan stabilnya usaha pada bidang-bidang tersebut.

Perhitungan DLQ digunakan untuk mengetahui perubahan sektoral. DLQ merupakan bentuk modifikasi dari SLQ dengan mengakomodasi besarnya PDRB dari nilai produksi sektor atau sub sektor dari waktu ke waktu. Naik turunnya LQ dapat dilihat untuk sektor tertentu pada dimensi waktu yang berbeda, perhitungan DLQ Kabupaten Gresik dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Perhitungan LQ Dinamis Kabupaten Gresik

Kategori	Lapangan Usaha	DLQ				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian	9,55	0,01	0,01	0,01	0,01
2	Pertambangan dan Penggalian	0,13	0,17	0,19	0,17	0,14
3	Industri Pengolahan	0,52	0,52	0,50	0,50	0,54
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,07	0,92	1,04	0,94	0,89
5	Konstruksi	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,81	0,76	0,76	0,76	0,67
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0,29	0,29	0,30	0,32	0,29
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,68	0,65	0,14	0,68	2,90
9	Jasa-jasa	0,79	0,80	0,78	0,76	0,78

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Gresik 2022

Identifikasi sub sektor unggulan dilakukan dengan melakukan perhitungan manual pada teknik analisa LQ dan DLQ yang digunakan. Dalam **tabel 4.4** perhitungan nilai DLQ Kabupaten Gresik dalam 5 tahun terakhir dapat di ketahui, yaitu pada tahun 2018 untuk sektor lapangan usaha pertanian memiliki jumlah DLQ sebesar 9,55 hal ini dipengaruhi oleh faktor banyaknya usaha jasa di bidang pertanian, namun untuk tahun berikutnya nilai DLQ mengalami penurunan sebesar 0,01. Sektor Industri Pengolahan nilai DLQ tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai 0,54 dan terendah pada tahun 2020 dan 2021 yaitu 0,50. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih memiliki nilai DLQ tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,07 dan terendah 0,89 pada tahun 2022. Pada sektor konstruksi nilai DLQ tertinggi terjadi pada tahun 2022 0,05 dan terendah pada 2018 dan 2019 sebesar 0,03. Perdagangan, Hotel dan Restoran tertinggi pada tahun 2018

dengan skor 0,81 dan terendah pada tahun 2022 dengan nilai 0,67. Pengangkutan dan Komunikasi nilai tertinggi 0,32 terjadi pada tahun 2021 dan terendah 0,97 pada tahun 2018, 2019 dan 2022. sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan nilai DLQ tertinggi Tahun 2022 dengan nilai 2,90 dan terendah 0,14 pada tahun 2020. Pada perhitungan analisis DLQ hasil yang ditujukan hampir sama dengan perhitungan LQ pada PDRB Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil perhitungan gabungan antara analisis LQ dan DLQ maka didapatkan sub sektor unggulan di kawasan strategis Kabupaten Gresik.

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi pada sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita pada sumbu horizontal. Tipologi Klassen yang membagi wilayah menjadi empat kuadran adalah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang pesat dan daerah relative tertinggal. Hasil perhitungan tipologi kelas dapat diketahui pada tabel berikut.

Tabel 4. 5 Perhitungan Klassen Kabupaten Gresik Tahun 2022

No	Lapangan Usaha	Prov. Jawa Timur		Kab. Gresik		Keterangan	Kuadran
		Rata-Rata Pertumbuhan Jatim (Gi)	Rata-Rata Distribusi	Rata-Rata Pertumbuhan Jatim (Gj)	Rata-Rata Distribusi		
1	Pertanian	0,03	12%	4,04	6%	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	1
2	Pertambangan dan Penggalan	0,05	5%	0,84	8%	Sektor Potensial atau Masih dapat Berkembang dengan Pesat	2
3	Industri Pengolahan	0,06	29%	0,31	49%	Sektor Potensial atau Masih dapat Berkembang dengan Pesat	2
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,01	0%	0,06	1%	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	1
5	Konstruksi	0,06	9%	2,29	6%	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	1
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,06	23%	0,16	17%	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	1
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0,08	8%	0,65	6%	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	1
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,06	5%	0,24	3%	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	1
9	Jasa-jasa	0,05	7%	0,15	3%	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	1

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Gresik 2022

Hasil perhitungan klassen Kabupaten Gresik pada sektor Pertambangan dan Penggalan dan juga Industri Pengolahan masuk kedalam kategori sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat, dan untuk sektor lainnya seperti Pertanian, Listrik, Gas, dan Air Bersih, Konstruksi, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa masuk kedalam kategori sektor maju dan tumbuh pesat. Sektor Pertambangan dan Penggalan serta sektor Industri Pengolahan adalah sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan, karena Kabupaten Gresik memiliki serta industri yang sedang berkembang pesat.

Lapangan usaha atau sektor pertambangan dan penggalan serta industri pengolahan mendapat hasil sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat pada wilayah Kabupaten Gresik. Disamping industri skala besar, di Kabupaten Gresik juga terdapat industri kecil yang perannya dalam struktur PDRB juga sangat penting. Sementara untuk sektor Pertambangan dan Penggalan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 8 % hal ini perlu diperhatikan lebih lanjut untuk terus ditingkatkan agar dapat menjadi sektor unggulan.

4.2 Perkembangan Demografi Kabupaten Gresik

Perkembangan Demografi Kabupaten Gresik menggambarkan kondisi perkembangan penduduk, perkembangan tenaga kerja dan tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik. Perkembangan penduduk akan dirincikan kedalam jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan jumlah penduduk menurut jenis kelamin sebagai berikut.

4.2.1 Perkembangan Penduduk Kabupaten Gresik

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Gresik tahun 2022 yaitu sebesar 1.314.895 Jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 1.106,23 per Km². Jumlah penduduk tersebut tersebar kedalam 18 kecamatan di Kabupaten Gresik. Berdasarkan Jumlah Penduduk Menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan yaitu sebesar 660.624 Jiwa. Kondisi demografi Kabupaten Gresik tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 4.6** sebagai berikut.

Tabel 4. 6 Kondisi Demografi Kabupaten Gresik Tahun 2022

No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa pe Km2)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Kecamatan Balongpanggang	26.697	26.992	53.689	840,47
2	Kecamatan Benjeng	31.533	31.312	62.845	1.025,87
3	Kecamatan Bungah	32.948	32.350	65.298	817,86
4	Kecamatan Cerme	40.933	40.282	81.215	1.132,23
5	Kecamatan Driyorejo	62.109	60.634	122.743	2.393,12
6	Kecamatan Dudusampeyan	23.493	23.565	47.058	633,44
7	Kecamatan Dukun	31.603	31.135	62.738	1.061,92
8	Kecamatan Gresik	37.915	38.432	76.347	13.781,05
9	Kecamatan Kebomas	59.816	58.773	118.589	3.932,00
10	Kecamatan Kedamean	30.850	30.371	61.221	928,29
11	Kecamatan Manyar	60.438	58.900	119.338	1.221,47
12	Kecamatan Menganti	72.961	71.067	144.028	2.095,56
13	Kecamatan Panceng	25.249	25.276	50.525	804,92
14	Kecamatan Sangkapura	25.387	25.225	50.612	427,94
15	Kecamatan Sidayu	21.993	21.499	43.492	922,81
16	Kecamatan Tambak	14.812	14.865	29.677	377,09
17	Kecamatan Ujung Pangkah	24.612	24.343	48.955	516,29
18	Kecamatan Wringinanom	36.934	35.911	72.845	1.163,29
Total		660.283	650.932	1.311.215	34.075,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2022

Berdasarkan **Tabel 4.6**, diketahui bahwa di tahun 2022 jumlah penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Menganti sebesar 144.028 Jiwa. Kecamatan Menganti yang Jumlah penduduknya tertinggi memiliki kepadatan penduduk nomor 4 tertinggi yaitu sebesar 2.095,56 Jiwa/Km². Hal tersebut disebabkan karena jumlah penduduk yang tinggi di Kecamatan Menganti diimbangi dengan luas wilayah yang tergolong luas yaitu seluas 68,73 Km². Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Tambak dengan jumlah penduduk hanya sebesar 29.677 Jiwa. Hal tersebut dikarenakan lokasi kecamatan yang berada di Pulau Bawean yang jauh dari ibu kota Kabupaten serta jenis guna lahan yang 92,82% merupakan hutan dan guna lahan tak terbangun lainnya.

Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik tahun 2022 sebesar **34.075,62** Jiwa/Km². Kepadatan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Gresik yaitu sebesar 13.781,05 Jiwa/Km². Hal tersebut disebabkan karena luas wilayah Kecamatan Gresik yang hanya seluas 5,54 Km². Kepadatan penduduk yang tinggi biasanya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah PDRB per kapita karena kepadatan penduduk yang besar akan meningkatkan pendapat masyarakat di daerah tersebut. Hal tersebutpun terjadi pada seluruh kecamatan

di Kabupaten Gresik. Berdasarkan Tabel 4.5, terdapat 5 kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi yang diikuti dengan meningkatnya PDRB perkapita. Kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Gresik dengan PDRB sebesar 9.982,90 T, Kecamatan Kebomas dengan PDRB sebesar 11.550,57 T, Kecamatan Driyorejo dengan PDRB sebesar 10.977,28 T, Kecamatan Menganti 11.773,03 T, dan Kecamatan Wringinanom dengan PDRB sebesar 5.610,66 T.

4.2.2 Perkembangan Tenaga kerja Kabupaten Gresik

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah sebesar 666.134 Jiwa. Jumlah penduduk usia bekerja terdiri dari jumlah penduduk angkatan kerja dan jumlah penduduk bukan angkatan kerja. Jumlah penduduk Angkatan kerja Kabupaten Gresik tahun 2022 sebesar 724.046 Jiwa yang dapat dilihat pada **Tabel 4.7** sebagai berikut.

Tabel 4. 7 Kondisi Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2022

Tahun	Angkatan Kerja		
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja
2016	-	-	-
2017	632.529	30.089	662.618
2018	625.842	38.681	664.523
2019	620.883	36.390	657.273
2020	628.952	56.261	685.213
2021	666.134	57.912	724.046

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2016-2022

Berdasarkan **Tabel 4.7**, diketahui bahwa jumlah angkatan kerja Kabupaten Gresik pada tahun 2021 sebesar 724.046 Jiwa. Angkatan kerja tersebut terbagi atas jumlah penduduk bekerja sebesar 666.134 Jiwa dan pengangguran sebesar 57.912 Jiwa. Jumlah pengangguran tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 38.833 Jiwa. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya dan tidak diimbangi dengan peningkatan ketersediaan lapangan kerja. Adanya pandemi Covid-19 juga menyebabkan terjadinya krisis ditengah kelompok angkatan kerja sehingga mengakibatkan sulitnya mencari kerja.

Peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi potensi namun terkadang juga dapat menjadi ancaman ekonomi apabila tidak dapat ditangani dengan baik. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 mengakibatkan jumlah angkatan kerja meningkat.

Tabel 4. 8 Jumlah Tenaga Kerja Per Kecamatan Di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

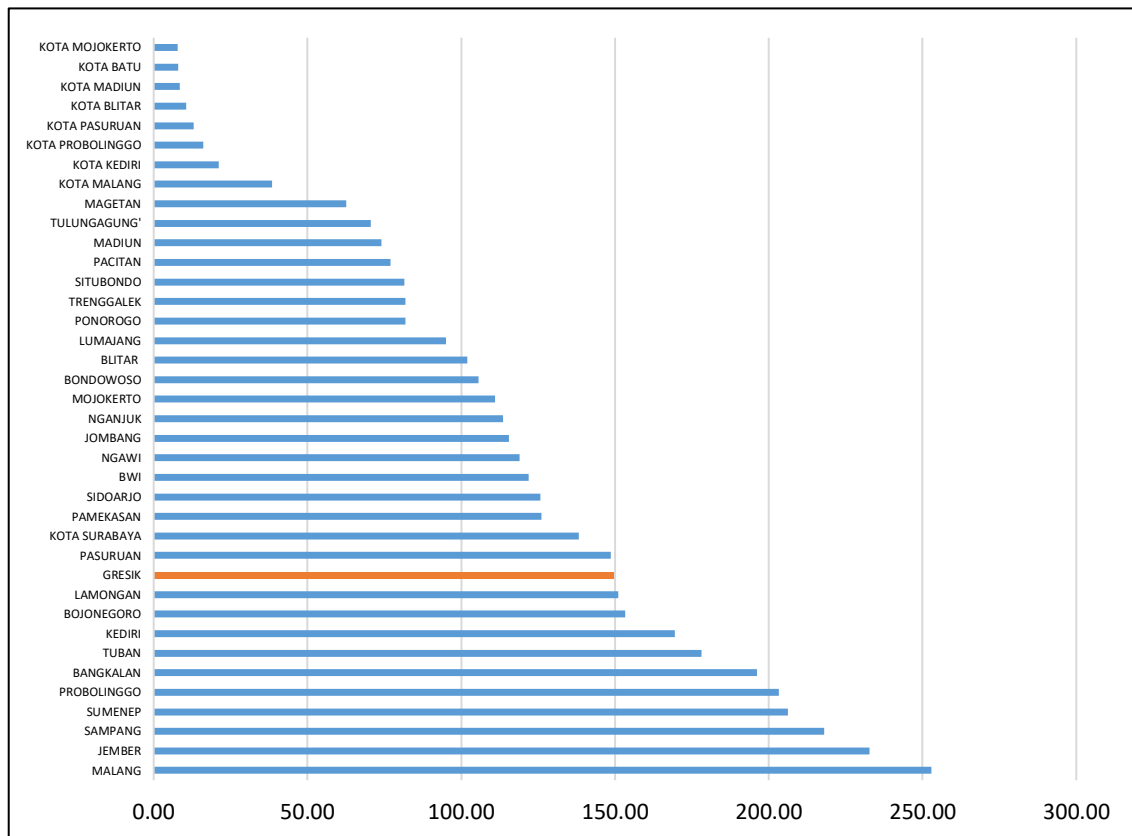
No.	Kecamatan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kecamatan Balongpanggang	37925	58714	12244	12244	13888	32560
2	Kecamatan Benjeng	31672	31477	31997	31997	-	32764
3	Kecamatan Bungah	19158	19158	19508	19508	19497	27831
4	Kecamatan Cerme	50424	30983	48949	48949	-	39960
5	Kecamatan Driyorejo	41637	41637	42078	42348	42889	48265
6	Kecamatan Dudusampeyan	21913	21693	-	40270	-	24079
7	Kecamatan Dukun	13129	13281	13086	13308	13176	29831
8	Kecamatan Gresik	45247	32990	33817	33817	33817	32208
9	Kecamatan Kebomas	41030	41761	42080	42512	746	46205
10	Kecamatan Kedamean	36355	31796	31796	31076	-	32937
11	Kecamatan Manyar	47739	47739	49300	49848	-	45842
12	Kecamatan Menganti	75971	77561	77769	57369	50579	58364
13	Kecamatan Panceng	17353	19810	40152	52609	52609	24165
14	Kecamatan Sangkapura	-	-	-	-	-	22152
15	Kecamatan Sidayu	24579	24915	24915	24915	24915	17792
16	Kecamatan Tambak	22716	13748	23820	23820	23820	13551
17	Kecamatan Ujung Pangkah	24429	23655	21898	41908	42135	21492
18	Kecamatan Wringinanom	36221	36221	-	38676	-	38534
Total		526.848	507.263	491.511	524.590	275.936	588.532

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022

Jumlah tenaga kerja Kabupaten Gresik merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Menurut **Tabel 4.8**, jumlah tenaga kerja tertinggi di Kabupaten Gresik berada pada Kecamatan Menganti dengan jumlah rata-rata tenaga kerja per tahunnya sebesar 67.805 Jiwa. Hal tersebut dipengaruhi oleh Kecamatan Menganti yang merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Gresik.

4.2.3 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Gresik

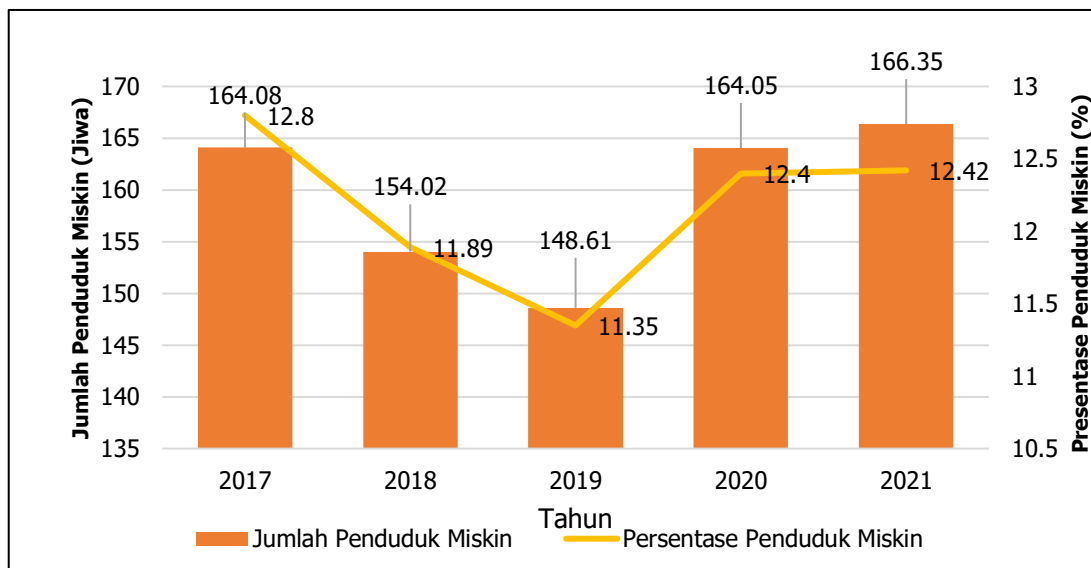
Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan dinamika penduduk yang sampai sekarang cukup sulit untuk diatasi. Setiap wilayah kabupaten maupun kota memiliki sejumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan juga terjadi pada beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur seperti **Gambar 4.4** berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2022

Gambar 4. 4 Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (ribu jiwa)

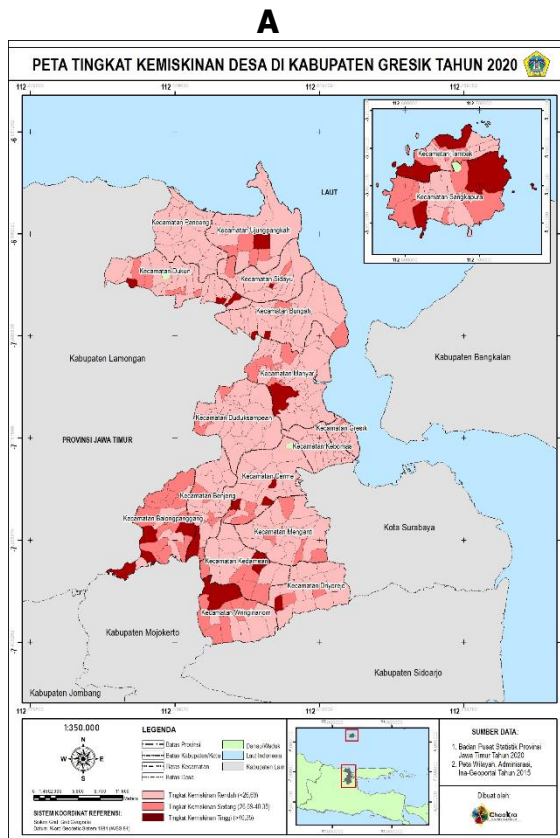
Jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 sebesar 4.186.300 Jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dimana kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 4.254.070 Jiwa. Hal tersebut utamanya dipengaruhi dengan pasca pandemic yang mana kondisi perekonomian berangsur pulih. Berdasarkan **Gambar 4.5**, diketahui bahwa daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi adalah Kabupaten Malang sebesar 265.560 Jiwa. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin terendah adalah Kota Blitar sebesar 1.110 Jiwa. Kabupaten Gresik berada pada peringkat ke-10 daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 164,050 Jiwa dan berkontribusi pada jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur sebesar 3,85%.



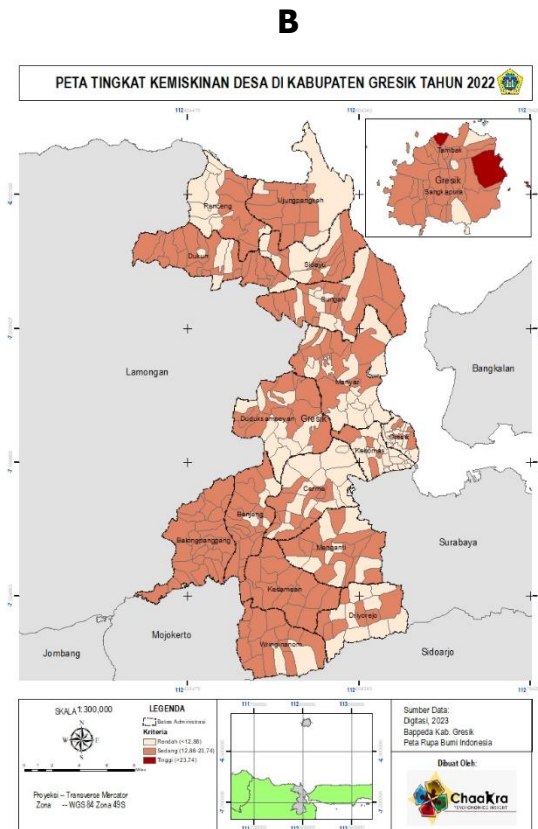
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2022

Gambar 4. 5 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Gresik

Berdasarkan **Gambar 4.6**, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Gresik tahun 2017 sebesar 164.080 Jiwa. Pada tahun 2017-2021 terus mengalami penurunan, namun tidak signifikan dimana persentase penduduk miskin tahun 2017 ke 2018 menurun sebesar 12,8% dan pada tahun 2018 ke 2019 menurun sebesar 11,89%, sedangkan untuk tahun 2019 ke tahun 2020 naik sebesar 11,35%. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya pemberlakuan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum sehingga mempengaruhi pendapatan dan konsumsi masyarakat. Kabupaten Gresik yang masuk dalam Kawasan Aglomerasi Gerbangkertosusila juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dapat dilihat pada **Tabel 4.6**, bahwa daerah yang masuk dalam Kawasan Aglomerasi Gerbangkertosusila masih menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor yang bersifat padat modal, sementara sektor yang banyak menyerap tenaga kerja di Kawasan Gerbangkertosusila seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan berskala kecil kontribusinya sedikit. Oleh sebab itu adanya Aglomerasi Gerbangkertosusila belum dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.



Gambar 4. 6 Peta Tingkat Kemiskinan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020



Gambar 4. 7 Peta Tingkat Kemiskinan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2022

Tabel 4. 9 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2017	2,51	0,71
2018	1,79	0,45
2019	2,21	0,61
2020	2,51	0,80
2021	2,15	0,61

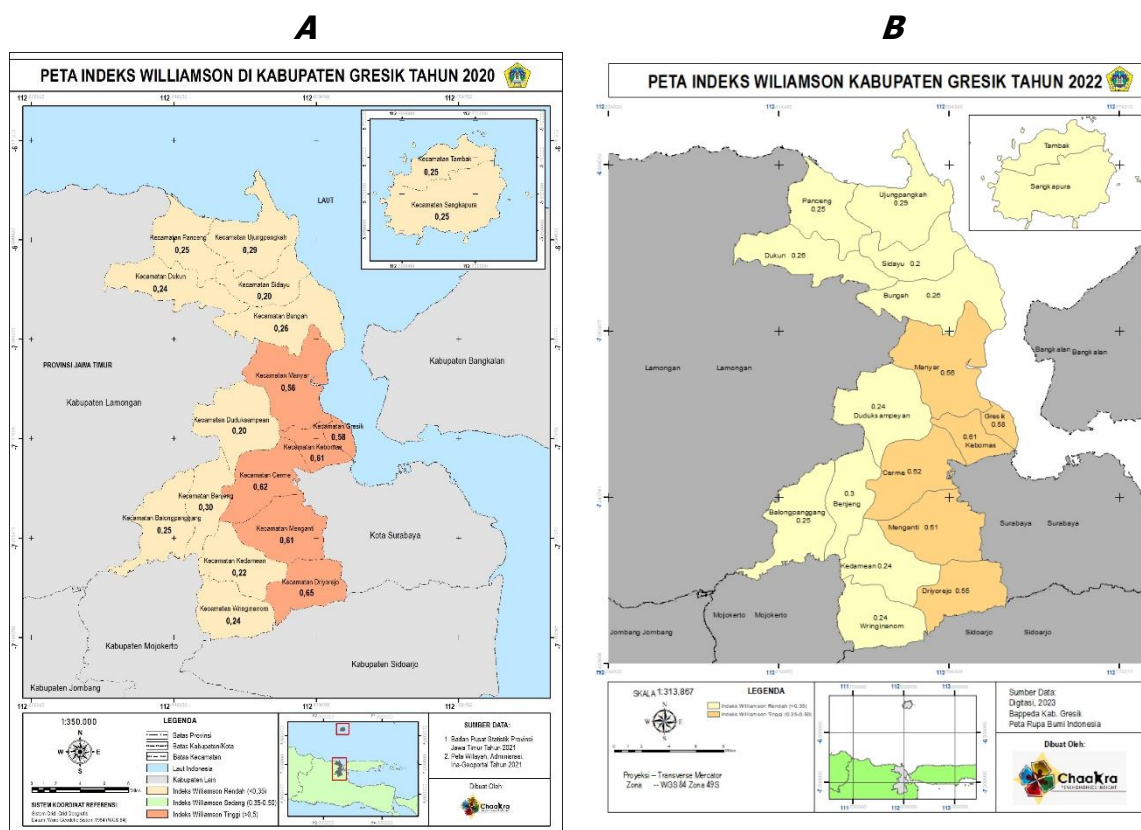
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berbeda halnya dengan P1, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Berdasarkan **Tabel 4.9**, diketahui bahwa P1 tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2020 yang masing-masing sebesar 2,51. Hal tersebut dapat menjadi

gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Gresik semakin jauh dari garis kemiskinan. Dan untuk indeks keparahan kemiskinan (P2) tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,80 yang memiliki arti bahwa terdapat ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin di Kabupaten Gresik.

4.3 Perhitungan Indeks Williamson

Hasil analisis ketimpangan berdasarkan Indeks Williamson dapat dikelompokkan ke dalam kategori wilayah dengan tingkat ketimpangan rendah dengan nilai Indeks Williamson $< 0,3$, tingkat ketimpangan sedang nilai antara $0,3-0,7$ dan tingkat ketimpangan tinggi dengan nilai Indeks Williamson $> 0,7$ (BAPENAS, 2013).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Gresik 2020

Gambar 4. 8 Peta Indeks Williamson Di Kabupaten Gresik Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Staistik, Kabupaten Gresik 2022

Gambar 4. 9 Peta Indeks Williamson Di Kabupaten Gresik Tahun 2022

Tabel 4. 10 Hasil Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten Gresik

No.	Kecamatan	Indeks Williamson					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

1	Kecamatan Balongpanggang	0.30	0.30	0.28	0.25	0.22	0.25
2	Kecamatan Benjeng	0.32	0.38	0.39	0.30	0.34	0.30
3	Kecamatan Bungah	0.27	0.27	0.26	0.26	0.29	0.26
4	Kecamatan Cerme	0.63	0.62	0.62	0.62	0.56	0.52
5	Kecamatan Driyorejo	0.73	0.69	0.69	0.65	0.61	0.55
6	Kecamatan Dudusampeyan	0.15	0.24	0.23	0.20	0.25	0.24
7	Kecamatan Dukun	0.27	0.28	0.26	0.24	0.29	0.26
8	Kecamatan Gresik	0.61	0.60	0.60	0.58	0.53	0.58
9	Kecamatan Kebomas	0.72	0.68	0.64	0.61	0.58	0.61
10	Kecamatan Kedamean	0.25	0.26	0.19	0.22	0.25	0.24
11	Kecamatan Manyar	0.62	0.59	0.58	0.56	0.51	0.56
12	Kecamatan Menganti	0.65	0.65	0.63	0.61	0.56	0.51
13	Kecamatan Panceng	0.26	0.27	0.29	0.25	0.26	0.25
14	Kecamatan Sangkapura	0.34	0.39	0.26	0.25	0.23	0.25
15	Kecamatan Sidayu	0.23	0.23	0.25	0.20	0.22	0.20
16	Kecamatan Tambak	0.24	0.25	0.29	0.25	0.24	0.25
17	Kecamatan Ujung Pangkah	0.33	0.33	0.32	0.29	0.23	0.29
18	Kecamatan Wringinanom	0.23	0.24	0.25	0.24	0.26	0.24

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Gresik Tahun 2022

Hasil perhitungan dengan menggunakan Indeks Williamson menunjukkan terjadinya disparitas atau kesenjangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Gresik yang ditunjukkan oleh nilai Indeks Williamson yang lebih besar dari 0. Meskipun masih terjadi kesenjangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Gresik namun nilai Indeks Williamson memperlihatkan kecenderungan yang menurun dari tahun 2017-2022. Berdasarkan perhitungan rata-rata indeks williamson Kabupaten Gresik pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,40 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 0,35. Secara rata-rata ini, kesenjangan ini tergolong dalam kategori rendah. Disparitas pendapatan antar daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan Kabupaten Gresik melalui disparitas pendapatan antar kecamatan, atau dengan kata lain disparitas pendapatan kecamatan merupakan variabel mediasi dalam pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik.

Diperkirakan penurunan disparitas pendapatan ini salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, otonomi daerah



dan desentralisasi fiskal memberikan perubahan yang signifikan terhadap pemerataan dan kesejahteraan, karena kebijakan ditentukan sesuai dengan potensi setiap daerah dan lebih mampu memperhitungkan kondisi regional dalam penyediaan barang, seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Ketimpangan Kewilayahan

Kabupaten Gresik merupakan satu kesatuan dalam wilayah *aglomerasi* Gerbangkartasusila. Dimana secara fisik, ekonomi dan sosial sangat terdampak secara resiprokal perekonomian Kota Surabaya. Hal ini terlihat berdasarkan data PDRB per Kecamatan yang ditunjukkan pada **Gambar 4.2** memperlihatkan bahwa wilayah-wilayah yang berbatasan langsung mendapatkan *spillover effect* dari Kota Surabaya. Hal ini terlihat dari perembetan Kawasan perumahan di Kota Surabaya ke wilayah pinggiran Kabupaten Gresik yang berbatasan dengan Kota Surabaya.

Selain faktor *spillover effect* dari Kota Surabaya, ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Gresik juga disebabkan oleh faktor internal. Salah satunya yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Gresik adalah kegiatan industri merupakan sektor yang mendominasi struktur ekonomi di Kabupaten Gresik hingga mencapai 57,21%. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan perekonomian di Kabupaten Gresik diantara kecamatan dengan dominasi tenaga kerja di sektor industri yang lebih mengarah ke perkotaan dengan kecamatan yang didominasi oleh tenaga kerja di bidang pertanian yang lebih mengarah ke wilayah perdesaan. Adapun sebagian besar industri di kabupaten Gresik terkonsentrasi di Kecamatan Kebomas, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Manyar dan Kecamatan Gresik dimana wilayah ini juga masih saling berdekatan.

Sektor industri di Kabupaten Gresik mulai berkembang dan mempengaruhi perekonomian wilayah Kabupaten Gresik pada tahun 1953. Dimana pada saat itu muncul rencana pembangunan pabrik semen berskala besar, guna memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Dimana pabrik ini dikenal dengan nama Semen Gresik yang sekarang sudah berada dibawah holding Semen Indonesia. Selanjutnya, ketika pabrik ini masih dalam tahap pembangunan, terdapat juga rencana pembangunan perumahan yang disiapkan untuk para karyawannya. Kemudian setelah pabrik semen Gresik berdiri, tak lama kemudian dibangun

pabrik PT. Petrokimia di tahun 1972. Disusul oleh pabrik-pabrik lain seperti pabrik kayu lapis (PT. Nusantara Plywood, PT. Sumbermas dan PT. Indah Plywood) yang lokasinya berada di wilayah Kecamatan Gresik. Sehingga mulai saat itu sampai sekarang terjadi transformasi perekonomian Kabupaten Gresik dari sektor pertanian menjadi sektor industri.

Dari sisi tenaga kerja, munculnya industri-industri baru yang berlokasi di Kecamatan Kebomas, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Manyar dan Kecamatan Gresik menyebabkan terjadinya arus Urbanisasi dan Migrasi dari kecamatan-kecamatan disekitar menuju 4 (empat) kecamatan tersebut. Hal ini juga didukung oleh pembangunan infrastruktur pendukung seperti Kawasan perumahan, Kawasan pertokoan, Rumah Sakit, Kawasan pendidikan dan juga Kawasan pemerintahan. Dimana hal ini mendorong konsentrasi pusat perekonomian Kabupaten Gresik terkonsentrasi di wilayah tersebut.

Terlepas dari kondisi makro ekonomi yang begitu baik, disparitas PDRB antar Kecamatan di Kabupaten Gresik masih sangat tinggi. Tahun 2015, PDRB tertinggi berada di Kecamatan Driyorejo sebesar Rp. 10,15 Trilyun dan PDRB terendah berada di Kecamatan Tambak di Kepulauan Bawean sebesar Rp. 1,03 Triliun. Kedua nilai PDRB tersebut menunjukkan disparitas yang sangat tinggi. Posisi ini tidak berubah di tahun 2020, meskipun terjadi pandemic Covid-19, Kecamatan Driyorejo tetap mencatatkan sebagai Kecamatan dengan tingkat PDRB tertinggi di Kabupaten Gresik sebesar 1,13 Triliun. Sedangkan PDRB terendah masih berada di Kecamatan Tambak di tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp. 1,9 Triliun.

Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah akan selalu dihadapi oleh daerah di negara berkembang (Balisacan dan Fuwa, 2003). Permasalahannya adalah jika ketimpangan tersebut terus dibiarkan semakin tinggi, maka akan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik secara agregat. Dari sudut pandang spasial, seharusnya semakin dekat jarak antar-wilayah, semakin kuat interaksinya (Lee dan Wong, 2001: 78-79). Dengan demikian, seharusnya wilayah-wilayah pusat pertumbuhan di Kabupaten Gresik harusnya terjadi hubungan saling melengkapi antar kecamatan. Selain itu,

daerah yang relatif lebih maju/kaya dapat memberikan dorongan kepada daerah di sekitarnya (Kubis *et al.*, 2007).

Akan tetapi, hingga tahun 2020, tingkat ketimpangan PDRB antar kecamatan di Kabupaten Gresik memang mengalami tren penurunan disparitas antar wilayah namun masih tetap tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan masih kurangnya *efek multiplier* pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan sehingga menyebabkan masih tingginya tingkat disparitas antar wilayah di Kabupaten Gresik. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka indeks Williamson (IW) Kabupaten Gresik pada tahun 2020 di angka 0,5.

Wilayah dengan tingkat disparitas tinggi (Nilai IW 50 <) terpusat di wilayah yang berbatasan dengan Kota Surabaya, seperti Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Cerme, Kecamatan Menganti dan Kecamatan Driyorejo. Kondisi ini tidak banyak berubah dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Selain memiliki keuntungan geografis, pada kawasan ini juga terpusat tenaga kerja terampil. Dari tahun 2015-2022, mayoritas tenaga kerja terampil baik dari dalam Kabupaten Gresik maupun dari luar Kabupaten Gresik terpusat di 5 (lima) kecamatan tersebut. Ketersediaan tenaga kerja terampil/berpendidikan merupakan faktor lain yang signifikan ikut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Gigih, 2019).

Hal ini dikarenakan, di 5 (lima) kecamatan terdapat tiga aspek, yaitu keuntungan geografi (pusat pembangunan infrastruktur), pusat Kawasan industri dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Sedangkan untuk wilayah diluar 5 (lima) kecamatan tersebut termasuk wilayah kecamatan dengan nilai ketimpangan rendah. Hal tersebut dikarenakan kecamatan yang termasuk kedalam tipologi wilayah dengan kesenjangan rendah tersebut mayoritas penduduk memiliki jenis pekerjaan yang homogen dan didominasi oleh penduduk yang bekerja pada sektor primer/ pertanian. Selain itu, jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk di wilayah kecamatan dengan kesenjangan rendah ini masih tergolong rendah. Hal tersebut mengindikasikan adanya pemerataan atau kesamaan tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan penduduk sehingga tidak terlalu terlihat gap atau kesenjangan antar wilayah di kecamatan yang termasuk dalam tipologi ini.

Berbeda dengan 5 (lima) kecamatan yang memiliki indeks Williamson tinggi, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Cerme, Kecamatan Menganti dan Kecamatan Driyorejo. Hal tersebut dikarenakan kecamatan yang termasuk kedalam tipologi wilayah dengan kesenjangan tinggi tersebut mayoritas penduduk memiliki jenis pekerjaan yang heterogen dan didominasi oleh penduduk yang bekerja pada sektor sekunder serta tersier. Meskipun masih dapat dijumpai, beberapa penduduk yang masih bekerja pada sektor primer/pertanian. Adapun jumlah penduduk serta pertumbuhan penduduk terutama penduduk datang pada wilayah ini tergolong sangat tinggi dan berlangsung cepat. Hal tersebut yang kemudian mengindikasikan adanya ketidakmertaan tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan penduduk sehingga terlihat gap atau kesenjangan yang cukup tinggi antar wilayah di dalam kecamatan yang termasuk dalam tipologi ini.

5.2 Analisis Korelasi Faktor-Faktor Penyebab Kesenjangan Antar Wilayah

Analisis yang dilakukan selanjutnya adalah analisis *korelasi*. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang memiliki hubungan terhadap tingkat kesenjangan wilayah yang terjadi di tiap kecamatan di Kabupaten Gresik. Analisis korelasi dilakukan dengan menghitung nilai signifikansi dan tingkat korelasi antara nilai kesenjangan wilayah (IW) dengan variabel-variabel penyebab kesenjangan wilayah dari aspek ekonomi dan sosial.

Untuk itu dilakukan perhitungan dengan menggunakan *pearson correlation* untuk melihat apakah variable tertentu memiliki hubungan dengan tingkat ketimpangan yang terjadi. Variabel yang memiliki hubungan terhadap nilai kesenjangan wilayah adalah variabel yang memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Jika hasil dari *pearson correlation* semakin mendekati angka 1, maka hubungan korelasi yang terjadi antara variabel dengan kesenjangan wilayah semakin kuat. Jika angka didalam *pearson correlation* menunjukkan hasil positif, memberikan arti bahwa variabel tersebut berbanding lurus dengan tingkat ketimpangan wilayah yang terjadi. Adapun hasil perhitungan korelasi dapat dilihat pada **Tabel 5.1** berikut :

Tabel 5. 1 Korelasi Variabel Sosial-Ekonomi Dengan Ketimpangan Wilayah Di Kabupaten Gresik

Variabel Sosial-Ekonomi	Signifikansi	Perason Correlation	Keterangan
Rata-rata lama sekolah	0,032	-0,732	Hubungan Negatif
Tingkat Kemiskinan	0,023	0,843	Hubungan Positif
% Jalan Terlulus Yang Sudah Beraspal di Kecamatan	0,245	0,472	Tidak Berhubungan
Rasio Fasilitas Kesehatan/1000 penduduk	0,014	-0,672	Hubungan Negatif
Ketersediaan Sanitasi Sehat	0,421	0,372	Tidak Berhubungan
Jumlah Penduduk Datang	0,036	0,578	Hubungan Positif
Jumlah Fasilitas Sekolah	0,024	-0,672	Hubungan Negatif
Jumlah Koperasi	0,001	0,771	Hubungan Positif
Jumlah Kantor Bank	0,008	0,653	Hubungan Positif
Ketersediaan Pasar Permanen	0,031	0,532	Hubungan Positif
Ketersediaan Kompleks Pertokoan	0,032	0,582	Hubungan Positif
Banyaknya jenis kriminalitas yang terjadi	0,022	0,777	Hubungan Positif
Banyaknya jenis upaya masyarakat menjaga keamanan lingkungan	0,432	0,377	Tidak Berhubungan
Cakupan rumah tangga dengan akses air minum layak	0,002	-0,892	Hubungan Negatif
Rata-rata PDRB Per Kapita Sektor Industri	0,01	0,673	Hubungan Positif
Rata-rata PDRB Sektor Pertanian	0,732	0,123	Tidak Berhubungan

Sumber : BPS diolah (2020)

Berdasarkan **Tabel 5.1**, maka penjelasan variabel yang memiliki hubungan signifikan terhadap nilai dari kesenjangan wilayah antar Kecamatan di Kabupaten Gresik terbagi kedalam beberapa sebagai berikut :

1. Aspek Sumber Daya Manusia :
 - a. Rata-rata lama sekolah penduduk di suatu Kecamatan memiliki nilai korelasi negatif sebesar -0,732. Hal ini memberikan pengertian, bahwa semakin meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk di seluruh kecamatan Kabupaten Gresik berpotensi untuk menurunkan kesenjangan wilayah yang terjadi antar kecamatan. Begitu juga sebaliknya,
 - b. Tingkat kemiskinan *aggregate* pada suatu kecamatan memiliki nilai korelasi positif sebesar 0,843. Hal ini memberikan pengertian, bahwa semakin meningkatnya kemiskinan pada suatu kecamatan, akan

meningkatkan kesenjangan wilayah yang terjadi antar kecamatan.
Begitu juga sebaliknya,

2. Aspek Infrastruktur Fisik

- a. Rasio fasilitas Kesehatan/1000 penduduk pada suatu kecamatan memiliki nilai korelasi negatif sebesar -0,672. Hal ini memberikan pengertian, bahwa semakin meningkatnya rasio fasilitas Kesehatan/1000 penduduk pada suatu kecamatan berpotensi untuk menurunkan kesenjangan wilayah yang terjadi antar kecamatan.
Begitu juga sebaliknya,
- b. Jumlah penduduk datang memiliki nilai korelasi positif sebesar 0,578. Hal ini memberikan pengertian, bahwa semakin meningkatnya perpindahan penduduk pada suatu kecamatan, akan meningkatkan kesenjangan wilayah yang terjadi antar kecamatan.
- c. Jumlah fasilitas sekolah pada suatu kecamatan memiliki nilai korelasi negatif sebesar -0,672. Hal ini memberikan pengertian, bahwa semakin meningkatnya jumlah fasilitas sekolah pada suatu kecamatan berpotensi untuk menurunkan kesenjangan wilayah yang terjadi antar kecamatan.

3. Aspek Modal Keuangan

- a. Jumlah koperasi pada suatu kecamatan memiliki nilai korelasi positif sebesar 0,771. Hal ini memberikan pengertian, bahwa semakin meningkatnya jumlah koperasi pada suatu kecamatan berpotensi untuk meningkatkan kesenjangan wilayah yang terjadi antar kecamatan.
- b. Jumlah kantor bank pada suatu kecamatan memiliki nilai korelasi positif sebesar 0,653. Hal ini memberikan pengertian, bahwa semakin meningkatnya jumlah kantor bank pada suatu kecamatan berpotensi untuk meningkatkan kesenjangan wilayah yang terjadi antar kecamatan.
- c. Ketersediaan pasar permanen pada suatu kecamatan memiliki nilai korelasi positif sebesar 0,532. Hal ini memberikan pengertian, bahwa semakin meningkatnya ketersediaan pasar permanen pada suatu

kecamatan berpotensi untuk meningkatkan kesenjangan wilayah yang terjadi antar kecamatan.

- d. Ketersediaan komplek pertokoan memiliki nilai korelasi positif sebesar 0,582. Hal ini memberikan pengertian, bahwa semakin meningkatnya ketersediaan pasar permanen pada suatu kecamatan berpotensi untuk meningkatkan kesenjangan wilayah yang terjadi antar kecamatan.

4. Aspek Sosial

- a. Banyaknya jenis kriminalitas yang terjadi memiliki nilai korelasi positif sebesar 0,777. Hal ini memberikan pengertian, bahwa semakin meningkatnya tindak kriminalitas pada suatu kecamatan berpotensi untuk meningkatkan kesenjangan wilayah yang terjadi antar kecamatan.
- b. Cakupan rumah tangga dengan akses air minum layak memiliki nilai korelasi negatif sebesar -0,892. Hal ini memberikan pengertian, bahwa semakin sedikitnya warga yang tidak memiliki akses air minum layak pada suatu kecamatan berpotensi untuk meningkatkan kesenjangan wilayah yang terjadi antar kecamatan.

5. Aspek Ekonomi

Rata-rata PDRB per kapita sektor industri memiliki nilai korelasi positif sebesar 0,673. Hal ini memberikan pengertian, bahwa semakin meningkatnya pendapatan masyarakat dari industri pada suatu kecamatan berpotensi untuk meningkatkan kesenjangan wilayah yang terjadi antar kecamatan.

Berdasarkan hasil analisis korelasi, terdapat beberapa catatan menarik untuk diperhatikan. Pertama, pada saat tingkat ketimpangan antar wilayah meningkat, terdapat beberapa wilayah yang mengalami kenaikan tingkat kesejahteraan. Pendapatan per kapita masyarakat rata-rata mengalami kenaikan sebesar 4,8%. Kedua, semakin beragamnya sektor pekerjaan yang dijalani penduduk suatu kecamatan akan meningkatkan probabilitas ketimpangan yang terjadi. Hal ini mungkin juga didorong oleh perbaikan infrastruktur umum, seperti irigasi pertanian maupun banyak desa diwilayah tersebut yang memiliki akses keluar yang dapat dilalui kendaraan roda empat.

Ketiga, walaupun proporsi penduduk usia produktif mengalami stagnansi, terjadi peningkatan cukup berarti pada indikator SDM lain. Seperti meningkatnya rata-rata lama bersekolah sebesar 23% dalam satu dekade, yakni dari 5,47 tahun pada 2010 menjadi 7,72 tahun pada 2022. Hal ini berarti bahwa hingga 2022 rata-rata penduduk desa telah menyelesaikan sekolah dasar (SD). Selain itu, masyarakat juga telah menikmati perbaikan fasilitas dasar pendidikan seperti tersedianya lebih banyak sekolah SD dan SMP. Meskipun tidak bisa dimungkiri bahwa kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan kota Surabaya memiliki fasilitas pendidikan lebih banyak daripada kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto.

Dalam hal aspek modal keuangan, terdapat peningkatan jumlah infrastruktur yang mendukung perekonomian wilayah dalam 5 (lima) tahun terakhir, seperti meningkatnya ketersediaan kantor bank, kompleks pertokoan, pasar dan bank BPR. Selanjutnya, terjadi stagnasi pada wilayah-wilayah kecamatan untuk mengakses layanan dasar seperti sanitasi dan air minum layak. Pada saat proporsi keluarga rentan mengalami penurunan yang ditandai dengan berkurangnya proporsi rumah tangga dikepalai perempuan, kedekatan antarwarga desa yang menggambarkan modal sosial juga mengalami penurunan. Hal ini menyiratkan makin lemahnya kohesi sosial masyarakat yang diindikasikan dengan makin sedikitnya bentuk upaya masyarakat untuk bersamasama menjaga keamanan lingkungan dan makin sedikitnya desa-desa yang melaporkan adanya kegiatan rukun warga seperti kerja bakti atau gotong royong. Meski demikian, dalam kurun sepuluh tahun, kejadian kriminalitas di desa tidak mengalami peningkatan, bahkan cenderung turun.

5.3 Analisis Model Ekonometri

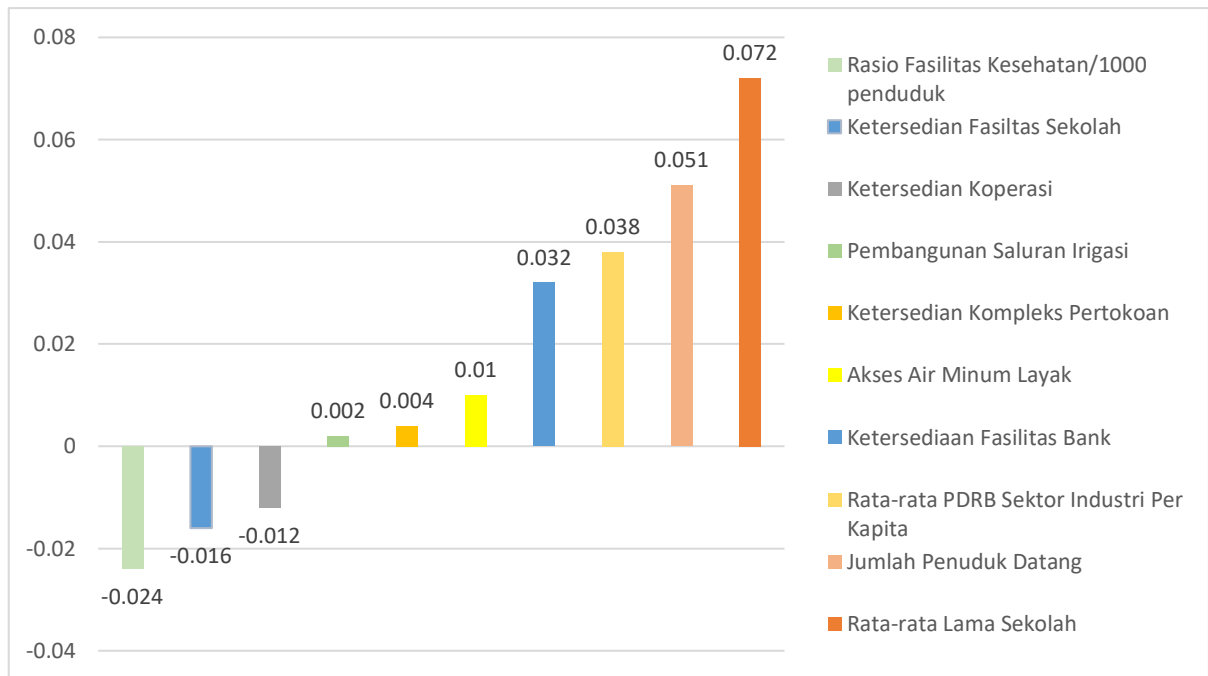
Pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis model ekonometri data panel dengan *first-difference* yang kekuatannya sudah diuji dengan metode *bootstrap*¹. Selain itu, seluruh pembahasan akan menitikberatkan pada variabel

¹ Hasil model sebelum diuji dan sesudah diuji dengan metode *bootstrap* dapat dilihat pada lampiran. Meskipun tidak terdapat banyak perbedaan hasil antara keduanya, hasil estimasi setelah melalui metode *bootstrap* lebih akurat.

dengan signifikansi korelasi di bawah 5%². Dari 16 variabel independen yang dianalisis pada studi ini, terdapat 11 variabel yang secara signifikan menentukan tingkat ketimpangan antar kecamatan untuk keseluruhan wilayah di Kabupaten Gresik. Sebagian besar variabel-variabel tersebut berkorelasi dengan ketimpangan dalam kecamatan yang lebih tinggi; hanya 5 (lima) variabel yang menunjukkan sebaliknya, yaitu rata-rata lama sekolah penduduk desa yang lebih tinggi, jumlah koperasi yang tersedia di desa, rata-rata penduduk yang bekerja di sektor pertanian, adanya kegiatan kerja bakti di desa dan banyaknya jenis upaya masyarakat menjaga keamanan lingkungan. Hasil tersebut bervariasi ketika tingkat ketimpangan dipisahkan berdasarkan pola penghidupan, yaitu desa yang mayoritas penduduknya mengalami perubahan mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian atau sebaliknya, maupun desa yang tidak mengalami perubahan.

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator SDM yang berpengaruh secara konsisten dengan ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Gresik. Ketika rata-rata lama sekolah pada masyarakat di hampir seluruh desa di dalam kecamatan semakin tinggi, maka tingkat ketimpangan di kecamatan tersebut cenderung rendah. Hasil yang sama juga diperoleh ketika analisis dipisahkan berdasarkan perubahan tipologi penghidupan utama masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa secara geografis, modal SDM cenderung memiliki efek menyetarakan (*equalizing*) pada kecamatan di Kabupaten Gresik.

² Pada koefisien dengan signifikansi 10%, interval keyakinan (*confidence interval*) akan melewati nol yang berarti bahwa signifikansi koefisien ini lemah.



Sumber : Estimasi Data Podes dan Susenas Kab Gresik, 2015-2022

Gambar 5. 1 Hasil Estimasi Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Gresik

Temuan mengenai variasi pengaruh penduduk datang didukung temuan bahwa kecamatan yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi memiliki tingkat ketimpangan yang juga tinggi. Rata-rata tingkat PDRB per kapita sektor industri merupakan indikator nyata tingkat kesejahteraan yang korelasinya dengan tingkat ketimpangan kecamatan konsisten positif signifikan. Selanjutnya, tersedianya infrastruktur fisik memiliki hubungan yang berbeda-beda terhadap ketimpangan antar wilayah kecamatan. Misalnya, infrastruktur saluran irigasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap peningkatan ketimpangan antar wilayah kecamatan pada umumnya. Kualitas jalan yang lebih baik berpengaruh signifikan terhadap kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Mojokerto tetapi tidak berpengaruh signifikan pada kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan kota Surabaya. Hal yang sama juga berlaku pada ketersediaan kompleks pertokoan maupun ketersediaan Bank di setiap desa pada suatu kecamatan yang memiliki pengaruh positif signifikan.

Variabel lain seperti peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih rendah, beberapa indikator lain yang berkaitan dengan aspek kesehatan menunjukkan arah yang

berlawanan. Peningkatan cakupan rumah tangga yang mengakses air minum layak justru berpengaruh positif signifikan dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Hal ini tentu saja bisa meningkatkan probabilitas terjadinya malnutrisi dan pencemaran lingkungan yang secara pasti berdampak buruk pada kesehatan. Adanya korelasi positif antara beberapa indikator pembangunan infrastruktur dan tingkat ketimpangan tidak serta-merta mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur harus dihentikan guna mencegah tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Hal ini justru menunjukkan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur sampai pada tingkat desa terutama untuk kecamatan kecamatan yang tertinggal.

Sebagai contoh, terdapat variasi hubungan antara variabel pada kategori modal finansial dengan tingkat ketimpangan Kecamatan. Jenis lembaga keuangan yang lebih mungkin diakses oleh masyarakat miskin, seperti koperasi, tampak berpengaruh dengan tingkat ketimpangan yang lebih rendah. Sementara itu, keberadaan lembaga perbankan berpengaruh dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Dalam kaitannya dengan tipologi penghidupan, pengaruh antara keberadaan koperasi dan tingkat ketimpangan yang lebih rendah cenderung tampak pada wilayah yang tidak mengalami perubahan struktur ekonomi, baik yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Sementara itu, ketersediaan lembaga perbankan disuatu wilayah berpengaruh positif dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi di wilayah yang sedang mengalami transformasi struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian.

5.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada sub-bab ini akan membahas beberapa faktor utama yang mempengaruhi ketimpangan antar kecamatan yang ditemukan didalam studi ini. Dari 18 (delapan belas) variabel yang tergabung dalam kelima modal kesejahteraan wilayah, hampir semuanya ditemukan berpengaruh secara signifikan dengan ketimpangan antar wilayah. Analisis heterogenitas tidak menunjukkan perbedaan hasil yang tampak pada pengelompokan desa berdasarkan wilayah. Terlepas dari hal itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator perekonomian suatu kecamatan yang lebih maju berpengaruh dengan ketimpangan antar kecamatan yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan

bahwa, pembangunan yang telah dilakukan pemerintah di Kabupaten Gresik belum dapat dinikmati sampai lapisan masyarakat termiskin.

5.4.1 Pengaruh Antara Indikator Perekonomian Kecamatan dan Ketimpangan Wilayah

Berdasarkan hasil model ekonometri, menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan ketimpangan tinggi pada kecamatan-kecamatan yang berdekatan dengan Kota Surabaya dan Sidoarjo. Hal ini dapat terjadi terutama dari ketersediaan saluran irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pekerja di sektor pertanian dan keberagaman sektor pekerjaan yang digeluti masyarakat di wilayah tersebut. Keragaman sektor pekerjaan tersebut, di satu sisi, menandakan makin luasnya kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan kota Surabaya dan Sidoarjo untuk meningkatkan penghasilan dan, di sisi lain, menunjukkan makin berkurangnya ketergantungan masyarakat wilayah tersebut pada sektor pertanian.

Bukti dari dua variabel ini menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah di wilayah pedesaan untuk meningkatkan pertumbuhan baik di sektor pertanian maupun nonpertanian masih belum dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini menggambarkan terjadinya proses pembangunan di perdesaan sebagaimana dikemukakan oleh Kuznets (1955) mengenai hubungan U-terbalik antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan.

Misalnya dalam hal pembangunan saluran irigasi, dimana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, namun kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Hal ini disebabkan terjadinya ketimpangan penguasaan lahan yang sangat besar di antara rumah-rumah tangga petani sehingga manfaat pembangunan saluran irigasi ini cenderung dinikmati oleh segelintir petani saja. Hal ini diperkuat oleh data sensus pertanian Kabupaten Gresik tahun 2013, yang menunjukkan bahwa 60% lahan pertanian di wilayah pedesaan dikuasai oleh 16% rumah tangga pertanian. Sebaliknya, lebih dari separuh rumah tangga pertanian di pedesaan hanya menguasai 12,67% lahan pertanian yang ada (BPS, 2013). Hal ini berarti bahwa

rata-rata petani hanya menguasai kurang dari setengah hektare lahan atau dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh rumah tangga petani di Kabupaten Gresik bekerja sebagai buruh tani untuk mendapatkan upah, bukan sebagai petani pemilik lahan. Oleh karena itu, manfaat perbaikan saluran irigasi akan lebih dinikmati oleh petani-petani penguasa lahan yang proporsinya tidak mencapai 20%.

Fakta bahwa pembangunan di sektor pertanian justru meningkatkan ketimpangan antar kecamatan juga didukung oleh terbukanya kesempatan kerja pada sektor non-pertanian. Hal ini dikarenakan perbaikan akses jalan keluar dan masuk desa yang telah meningkatkan arus perputaran orang dan barang. Hal ini juga diperkuat oleh arus penduduk datang yang juga berpengaruh positif terhadap terjadinya ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Gresik. Meskipun dalam studi ini, variabel akses perbaikan jalan hanya berpengaruh pada wilayah-wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Mojokerto dan Lamongan. Namun, lebih terbukanya akses keluar dan masuk desa di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Lamongan maka akan terbuka pula kesempatan bagi masyarakat perdesaan untuk bekerja di sektor nonpertanian, baik di antar desa didalam kecamatan mereka sendiri maupun dengan desa-desa lain diluar kecamatan. Namun, ketika sektor nonpertanian tersebut didominasi pekerjaan formal atau pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus, hanya masyarakat kelompok kesejahteraan atas dengan sumber daya yang memadai dapat menjangkanya.

Banyak studi telah membuktikan dampak positif dari sektor nonpertanian terhadap pembangunan kewilayahan (seperti Suryahadi, Suryadarma, dan Sumarto, 2009; Cherdchuchai dan Otsuka, 2006; Bezu dan Barrett, 2012). Hal ini juga didukung oleh data Survei Indonesia Family Life Survey (IFLS) 2000, 2007, dan 2014, Warda *et al.* (2018) menemukan adanya peningkatan proporsi orang yang beralih dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian, dari 10% dalam periode 2000–2007 menjadi 27,7% dalam periode 2007–2014. Hal ini diikuti dengan pertumbuhan pendapatan riil lebih dari 50% ketika orang-orang beralih dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian.

Meskipun terlihat lebih baik, namun tidak semua orang dapat mengakses kesempatan untuk bekerja di sektor non-pertanian (Barret, Reardon dan Webb, 2001). Terdapat beberapa hambatan besar untuk berpindah pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian, seperti keterbatasan informasi, rendahnya kemampuan, usia yang terlalu tua, dan terbatasnya jejaring sosial. Selain itu untuk masyarakat yang memiliki akses terhadap lahan dan kemampuan mengolahnya dengan teknologi lebih maju berpeluang lebih besar untuk beralih ke sektor nonpertanian (Madyan et al., 2020). Terjadinya ketimpangan yang lebih besar dalam penguasaan lahan di pedesaan menyebabkan hanya orang-orang yang memiliki sumber daya komprehensif yang lebih bisa menikmati pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gresik, seperti pekerjaan formal atau usaha berskala menengah-besar. Ketimpangan ini menyisakan orang-orang dengan sumber daya terbatas untuk bekerja di sektor nonpertanian yang keuntungannya kecil, seperti pekerjaan berupah rendah atau kegiatan usaha berskala kecil.

5.4.2 Pembangunan Kewilayahan Yang Inklusif Berpotensi

Menurunkan Tingkat ketimpangan

Studi ini mengkonfirmasi bahwa, pembangunan yang inklusif dengan menyasar wilayah-wilayah termiskin akan berpengaruh dalam menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah. Beberapa indikator yang bisa dikonfirmasi seperti peningkatan jumlah fasilitas kesehatan, ketersediaan lembaga keuangan mikro yang lebih mudah diakses oleh masyarakat miskin, dan peningkatan capaian pendidikan masyarakat miskin di wilayah-wilayah pedesaan yang jauh dari pusat pertumbuhan di Kabupaten Gresik (Kecamatan Gresik, Driyorejo, Kebomas dan Menganti). Hasil studi ini mengkonfirmasi bahwa terbukanya akses masyarakat pada desa-desa terjauh dari pusat pertumbuha terhadap sumber-sumber modal penghidupan akan meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan mobilitas sosial ke tingkat kesejahteraan lebih tinggi yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat ketimpangan.

Salah satunya adalah melakukan percepatan pembangunan *hard infrstruktur* pada wilayah-wilayah desa yang masih memiliki tingkat kemiskinan tinggi dapat membuka peluang bagi kelompok berpendapatan terbawah untuk

mengakses aset-aset produktif sehingga terjadi peningkatan nilai modal mereka (Pradesh & Pradesh, 2007). Kemudahan akses berkat keberadaan infrastruktur—termasuk telekomunikasi, listrik, jalan, air bersih, dan sanitasi—berperan penting dalam mengintegrasikan individu dan rumah tangga ke dalam kegiatan ekonomi dan sosial, termasuk dalam pemanfaatan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang dapat meningkatkan modal manusia masyarakat di desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Hasil studi juga mengkonfirmasi bahwa indikator-indikator yang berhubungan dengan Kesehatan masyarakat enunjukkan adanya perbaikan akses terhadap fasilitas kesehatan. Namun, tidak terjadi perbaikan kondisi lingkungan sehingga penanganan kejadian malnutrisi atau *stunting* di perdesaan makin sulit. Kabupaten Gresik telah cukup baik dalam melakukan pemerataan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Namun, pemerataan akses Kesehatan baru sampai pada level fasilitas kesehatan pratama (puskesmas, klinik dan rumah sakit tipe d) dimana fasilitas Kesehatan ini lebih banyak melakukan fungsi preventif daripada kuratif. Sedangkan fasilitas Kesehatan tingkat lanjut seperti rumah sakit tipe C masih lebih banyak berada di wilayah-wilayah pusat pertumbuhan (Kecamatan Gresik, Driyorejo, Kebomas dan Menganti).

Dengan tersedia fasilitas kesehatan terpadu yang lebih merata, dapat membuat masyarakat di kecamatan Dukung, Balopanggang atau Tambak dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Pada akhirnya, baik kelompok masyarakat menengah bawah maupun kelompok menengah atas dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk melipatgandakan keuntungan dari investasi pada modal manusia. Sementara itu, peningkatan akses terhadap air minum layak justru berpengaruh dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Salah satu penyebab yang mungkin adalah makin melebarinya kesenjangan akses terhadap air minum layak. Salah satu penyebabnya adalah PDAM Giri Tirta belum mampu menjangkau masyarakat di seluruh Kabupaten Gresik. Hal ini juga dikonfirmasi oleh wilayah-wilayah Kabupaten di China Utara yang jauh dari pusat pertumbuhan di wilayah China Barat (Liao & Wei, 2016).

Keterbatasan akses terhadap air minum layak menjadi salah satu faktor risiko utama malnutrisi pada anak-anak (Beal et al., 2018). Berdasarkan data

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, diketahui bahwa probabilitas anak untuk mengalami kekurangan gizi makin besar ketika ia tinggal di keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah. Lebih dari itu, kelompok termiskin cenderung lebih sering terpapar pencemaran lingkungan sehingga mereka lebih rentan terserang penyakit (Rizal & van Doorslaer, 2019). Gulab (2016) menjelaskan bahwa malnutrisi dan pencemaran lingkungan adalah dua hal yang berkontribusi besar pada kematian anak di Pakistan. Dengan demikian, orang miskin dan rentan adalah kelompok yang menanggung biaya paling besar untuk mengatasi permasalahan kesehatan, baik akibat pencemaran lingkungan maupun malnutrisi. Oleh karena itu, keduanya berkorelasi dengan ketimpangan yang lebih tinggi.

Pada indikator modal finansial, studi ini menemukan bahwa keberadaan bank komersial memiliki pengaruh positif dengan ketimpangan. Sebaliknya, koperasi dan BPR dapat berperan sebagai instrumen yang dapat menurunkan tingkat ketimpangan, mengingat terdapat pengaruh negatif di antara keduanya, terlebih di luar wilayah Kecamatan Gresik, Driyorejo, Kebomas dan Menganti. Bahwa peran lembaga keuangan di suatu wilayah dalam menentukan tingkat ketimpangan dipengaruhi sistem keuangan di wilayah tersebut dan sistem keuangan seperti koperasi, BPR dan lembaga mikro yang masih dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat perdesaan (Bebbington et al., 2006).

Hal ini dikarenakan, dalam usaha untuk mengakses layanan keuangan formal, salah satu hambatan yang dihadapi orang miskin dan rentan adalah terbatasnya kepemilikan aset sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan. Faktor penting lain yang menghalangi akses masyarakat miskin terhadap perbankan formal adalah tingginya biaya transaksi (Allen *et al.*, 2012). Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro, atau bahkan lembaga keuangan informal, sering kali menjadi pilihan utama bagi masyarakat miskin dibandingkan dengan lembaga keuangan formal seperti bank komersial. Hasil utama lain dari studi ini juga mengkonfirmasi terdapat pengaruh negatif antara peningkatan rata-rata lama sekolah di desa dan ketimpangan di hampir seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Gresik.

Hal tersebut memberikan informasi bahwa semakin tinggi rata-rata lama sekolah masyarakat di suatu wilayah kecamatan, makin rendah tingkat ketimpangan di antar wilayah di wilayah Kabupaten Gresik. Korelasi negatif antara capaian pendidikan dan ketimpangan ini sangat relevan dengan banyak studi sebelumnya. Studi meta regresi yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa bukan pendidikan yang menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan, melainkan ketimpangan akses terhadap pendidikan (Abdullah, Doucouliagos, dan Manning, 2015). Sejak pemerintah mencanangkan wajib belajar enam tahun pada tahun 1982, yang kemudian diperbarui dengan program wajib belajar Sembilan tahun di tahun 1990 dan terakhir menjadi program wajib belajar 12 tahun di tahun 2015.

Kebijakan tersebut membuat banyak perubahan terkait akses pendidikan bagi warga secara keseluruhan tak terkecuali untuk wilayah di Kabupaten Gresik. Hasil studi ini menemukan bahwa untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah hampir tidak ada ketimpangan yang terjadi baik antar wilayah maupun antar desil pendapatan. Ketimpangan baru terlihat terutama untuk capaian pendidikan tinggi. Penduduk di wilayah Kecamatan Gresik, Driyorejo, Kebomas dan Menganti memiliki capaian pendidikan tinggi lebih besar daripada penduduk di luar wilayah tersebut.

5.4.3 Kebijakan Pemkab Dalam Menurunkan Ketimpangan Antar Wilayah

Dokumen RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 menunjukkan beberapa program prioritas yang disebut *Nawa Karsa*. Berdasarkan dokumen tersebut, setidaknya terdapat beberapa program yang bisa digunakan diantaranya adalah : program PKH Inklusif, program Gebang Dusun, program Go Tani, program Koridor Investasi Gresik, program pembangunan Rumah Sakit Gresik Selatan, program upgrading rumah Sakit Bawean menjadi rumah Sakit Tipe C, program pengembangan BUMDes, program revitalisasi Gresik Kota Tua dan program pengembangan Revitalisasi Ekowisata. Berikut tabel yang menjelaskan keterkaitan program prioritas *Nawa Karsa* dengan variabel-variabel yang berpengaruh signifikan mengurangi tingkat ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Gresik :



Tabel 5. 2 Strategi Nawa Karsa Dalam Menurunkan Ketimpangan Antar Wilayah

Nama Program Prioritas	Keterangan	Indikator Ketimpangan Yang Disasar
Aspek Modal SDM		
Program PKH Inklusif	Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat rentan	Penurunan Tingkat Kemiskinan Agregat
Meningkatkan Infrastruktur Pendidikan Pulau Bawean	Peningkatan infrastruktur fisik dan non fisik pendidikan di pulau Bawean	Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah
Program Go Tani	Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan	Penurunan Tingkat Kemiskinan Agregat
Aspek Modal Fisik		
Program Pengendalian Banjir	Pencegahan dan penanggulangan banjir kali lamong	Penurunan tingkat bencana banjir
Program Gebang Dusun	Peningkatan infrastruktur fisik di level dusun	- Ketersedian saluran irigasi - Jalan beraspal di desa - Ketersedian komplek ekonomi
Program RS Gresik Selatan	Tersedianya fasilitas kesehatan tingkat lanjut di Gresik Selatan	Peningkatan rasio fasilitas kesehatan/1.000 penduduk
Peningkatan RS Bawean	Meningkatkan fasilitas kesehatan dan tenaga medis RS Bawean	Peningkatan rasio fasilitas kesehatan/1.000 penduduk
Aspek Modal Sosial		
Penguatan Ideologi Pancasila & Karakter Kebangsaan	Meningkatkan semangat gotong royong dan kesetiakawanan social	Peningkatan modal sosial masyarakat
Aspek Modal Ekonomi		
Gresik Kota Tua	Pengembangan pusat wisata baru	Peningkatan Pendapatan Per Kapita
Pengembangan Bumdes	Terciptanya BUMDEs yang mandiri	Peningkatan Keragaman Lap Kerja
Revitalisasi Ekowisata	Pertumbuhan ekowisata baru didesa	Peningkatan Keragaman Lap Kerja
Koridor Investasi Gresik	Pengembangan pusat investasi baru	Peningkatan Keragaman Lap Kerja

Berdasarkan **Tabel 5.2**, memperlihatkan bahwa secara strategi, pemerintah Kabupaten Gresik telah merencanakan program-program untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Namun tantangannya adalah terkait implementasi kebijakan di lapangan. Salah satu masalahnya adalah terkait dengan dualisme sosial. Dimana terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat dengan pendapatan per kapita tinggi dengan masyarakat miskin/rentan. Apa lagi sifat dari ketimpangan antar wilayah adalah sama seperti sifat gravitasi (*sentripetal forces*) dimana pusat perekonomian berkumpul hanya pada satu atau dua wilayah.

Sehingga untuk menjalankan strategi pada **Tabel 5.2** diperlukan paradigma pembangunan partisipatoris yang berfokus mengurangi ketimpangan antar wilayah. Ciri dari program pembangunan partisipatoris adalah adanya sifat resiprokal atau “saling memberi” dalam interaksi sosial antar anggota masyarakat. Dimana sifat pembangunan yang resiprokal dapat dikaitkan dengan konteks dualisme fungsi modal sosial, yaitu menguatkan solidaritas dalam kelompok yang homogen (*bonding social capital*) dan menjembatani perbedaan antarkelompok yang heterogen (Ehrlich & Pei, 2020). Hal ini untuk mencegah polarisasi aksi kolektif dalam masyarakat sesuai dengan besarnya ekspektasi manfaat yang dapat diberikan oleh anggota masyarakat tersebut. Dengan kata lain, masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi dan akses informasi dan jejaring yang lebih luas akan cenderung berjejaring dengan masyarakat dengan tingkat pengetahuan yang setara karena akan lebih menguntungkan.

Sebaliknya, masyarakat dengan pengetahuan terbatas yang pada umumnya juga berada di tingkat kesejahteraan terendah akan berjejaring dengan sesamanya. Akibatnya, kelompok masyarakat dengan pengetahuan lebih luas akan memiliki jejaring modal sosial yang makin luas pula dan kelompok miskin akan makin termarginalkan. Seharusnya kedua fungsi modal sosial tersebut saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Dengan pembangunan yang bersifat resiprokal, diharapkan terjadi *bridging* modal sosial yang akan menciptakan keterpaduan modal sosial antara kelompok kaya dan miskin serta menurunkan ketimpangan antar wilayah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

1. Indeks Williamson Kabupaten Gresik pada tahun 2022 berada pada angka 0,48 yang berkategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Pemkab Gresik berkontribusi terhadap pemerataan antar wilayah di Kabupaten Gresik.
2. Wilayah dengan tingkat disparitas tinggi (nilai IW $50 <$) tersebut berada di wilayah yang berbatasan dengan Kota Surabaya, seperti Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Cerme, Kecamatan Menganti dan Kecamatan Driyorejo. Hal ini dikarenakan pada 5 (lima) Kecamatan ini memiliki tiga aspek yaitu, keuntungan geografi (pusat pembangunan infrastruktur), pusat kawasan industri dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Sedangkan untuk wilayah di luar 5 (lima) Kecamatan tersebut dengan nilai ketimpangan rendah dikarenakan didominasi oleh penduduk yang berkerja pada sektor primer/pertanian.
3. Berdasarkan hasil model ekonometri, menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan ketimpangan tinggi pada kecamatan-kecamatan yang berdekatan dengan Kota Surabaya dan Sidoarjo. Ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Gresik periode 2015-2022 dipengaruhi oleh beberapa kegiatan antara lain kegiatan industri yang merupakan sektor mendominasi struktur ekonomi di Kabupaten Gresik hingga mencapai 57,21% hal tersebut yang menyebabkan perbedaan ekonomi di Kabupaten Gresik.
4. Konsentrasi kemiskinan pada Kabupaten Gresik tahun 2016 sebesar 157.120 Jiwa. Pada tahun 2017-2019 terus mengalami penurunan, namun tidak signifikan dimana persentase penduduk miskin tahun 2017 ke 2018 menurun sebesar 0,91% dan pada tahun 2019 ke 2020 menurun sebesar 1,52%. Lalu, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,03%.

6.2 SARAN

1. Mempercepat dan menginisiasi proses penganggaran berbasis kewilayahan untuk pembangunan infrastruktur baik jalan, transportasi dan pertanian-perikanan.
2. Pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur jalan dan jembatan pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan dapat mempercepat penurunan ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Gresik.
3. Pembangunan infrastruktur seperti jalan usaha tani dan revitalisasi kawasan kumuh terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dapat meningkatkan pengurangan ketimpangan di Kabupaten Gresik.
4. Mendorong koridor investasi Gresik dengan meningkatkan investasi-investasi baru di wilayah tertinggal pada Kabupaten Gresik.
5. Memperkuat institusi BUMDes melalui penguatan kelembagaan dan peraturan optimalisasi BUMDes agar dapat menutunkan tingkat ketimpangan antar wilayah.
6. Perlu dibangun sistem transportasi umum untuk memfasilitasi kemudahan pekerja dalam bergerak dari Gresik utara ke Gresik Selatan atau sebaliknya. Begitu juga pekerja dari pulau Bawean ke Gresik dan juga sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. (1999). Pengantar Perencana dan pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE Yogyakarta
- Bebe Bimantoro, R. (2020). PERKEMBANG EKONOMI NASIONAL DALAM INDONESIA. *Perkembangan Ekonomi Nasional Dalam Indonesia*.
- Ma'ruf, A., & Wihastuti, L. (2008). Pertumbuhan ekonomi indonesia: determinan dan prospeknya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 44-55.
- Raswita, Ngakan Putu Mahesa Eka., dan Made Suyana Utama. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Gianyar 2013. *E-Jurnal EP Unud*, 2 [3] : 119-128.
- Sjafrizal. (2008). Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Baduose Media. Padang.
- Sukirno, S. (2006). Ekonomi Pembangunan (2nd ed.). indonesia: Kencana Prenada Media
- Sutarno., dan Mudrajad Kuncoro. (2004). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Sutawijaya, A. (2004). Analisis Tingkat Pertumbuhan Dan Disparitas Antar Daerah Pada Era Otonomi Daerah.
- Syafrizal, M. (2012). Analisis Program Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Selat Baru Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Todaro, Michael.P dan Smith, Stephen C. (2006). Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga

LAMPIRAN

1. Kondisi Kependudukan Kabupaten Gresik Tahun 2015-2020

Tabel Perkembangan Penduduk Kabupaten Gresik Perkecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
			Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk
1	Kecamatan Balongpanggang	63,88	58.586	917,13	58.243,00	911,76	58.678,00	918,57	59.373,00	929,45	58.015,00	908,19	53.689,00	840,47
2	Kecamatan Benjeng	61,26	66.153	1.079,87	66.266,00	1.081,72	66.786,00	1.090,21	67.821,00	1.107,10	66.546,00	1.086,29	62.845,00	1.025,87
3	Kecamatan Bungah	79,84	67.060	839,93	67.176,00	841,38	67.720,00	848,20	68.904,00	863,03	68.342,00	855,99	65.298,00	817,86
4	Kecamatan Cerme	71,73	78.483	1.094,14	78.333,00	1.092,05	78.724,00	1.097,50	80.386,00	1.120,67	80.032,00	1.115,74	81.215,00	1.132,23
5	Kecamatan Driyorejo	51,29	103.109	2.010,31	103.895,00	2.025,64	105.300,00	2.053,03	106.757,00	2.081,44	102.646,00	2.001,29	122.743,00	2.393,12
6	Kecamatan Dudusampeyan	74,29	50.969	686,08	50.859,00	684,60	50.232,00	676,16	50.870,00	684,75	50.497,00	679,73	47.058,00	633,44
7	Kecamatan Dukun	59,08	67.143	1.136,48	67.744,00	1.146,65	67.364,00	1.140,22	68.480,00	1.159,11	67.127,00	1.136,21	62.738,00	1.061,92
8	Kecamatan Gresik	5,54	86.934	15.692,06	86.417,00	15.598,74	82.940,00	14.971,12	83.582,00	15.087,00	82.448,00	14.882,31	76.347,00	13.781,05
9	Kecamatan Kebomas	30,16	103.692	3.438,06	105.656,00	3.503,18	107.605,00	3.567,81	110.402,00	3.660,54	109.392,00	3.627,06	118.589,00	3.932,00
10	Kecamatan Kedamean	65,95	62.875	953,37	63.030,00	955,72	63.249,00	959,04	64.230,00	973,92	63.887,00	968,72	61.221,00	928,29
11	Kecamatan Manyar	97,7	111.205	1.138,23	112.862,00	1.155,19	113.868,00	1.165,49	116.294,00	1.190,32	114.893,00	1.175,98	119.338,00	1.221,47
12	Kecamatan Menganti	68,73	120.933	1.759,54	122.248,00	1.778,67	124.132,00	1.806,08	126.566,00	1.841,50	124.468,00	1.810,97	144.028,00	2.095,56
13	Kecamatan Panceng	62,77	52.036	828,99	52.519,00	836,69	52.392,00	834,67	53.384,00	850,47	52.599,00	837,96	50.525,00	804,92
14	Kecamatan Sangkapura	118,27	69.651	588,92	69.281,00	585,79	68.504,00	579,22	69.620,00	588,65	56.053,00	473,94	50.612,00	427,94
15	Kecamatan Sidayu	47,13	43.568	924,42	43.847,00	930,34	43.782,00	928,96	44.269,00	939,30	43.533,00	923,68	43.492,00	922,81
16	Kecamatan Tambak	78,7	38.110	484,24	37.983,00	482,63	38.298,00	486,63	39.146,00	497,41	32.519,00	413,20	29.677,00	377,09
17	Kecamatan Ujungpangkah	94,82	50.916	536,98	51.236,00	540,35	51.358,00	541,64	52.150,00	549,99	51.890,00	547,25	48.955,00	516,29
18	Kecamatan Wringinanom	62,62	72.350	1.155,38	72.844,00	1.163,27	72.894,00	1.164,07	74.137,00	1.183,92	73.297,00	1.170,50	72.845,00	1.163,29
Total		1193,76	1.303.773	35.264	1.310.439	35.314	1.313.826	34.829	1.336.371	35.309	1.298.184	34.615	1.311.215	34.076

2. Nilai PDRB Tingkat Kecamatan di Kabupaten Gresik (Dalam Triliun)

No.	Kecamatan	Indeks Williamson					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kecamatan Balongpanggang	0,26	0,28	0,30	0,30	0,28	0,25
2	Kecamatan Benjeng	0,27	0,36	0,32	0,38	0,39	0,30
3	Kecamatan Bungah	0,30	0,29	0,27	0,27	0,26	0,26
4	Kecamatan Cerme	0,64	0,64	0,63	0,62	0,62	0,62
5	Kecamatan Driyorejo	0,80	0,75	0,73	0,69	0,69	0,65
6	Kecamatan Dudusampeyan	0,15	0,20	0,15	0,24	0,23	0,20
7	Kecamatan Dukun	0,25	0,24	0,27	0,28	0,26	0,24
8	Kecamatan Gresik	0,67	0,69	0,61	0,60	0,60	0,58
9	Kecamatan Kebomas	0,75	0,74	0,72	0,68	0,64	0,61
10	Kecamatan Kedamean	0,22	0,21	0,25	0,26	0,19	0,22
11	Kecamatan Manyar	0,62	0,61	0,62	0,59	0,58	0,56
12	Kecamatan Menganti	0,74	0,68	0,65	0,65	0,63	0,61
13	Kecamatan Panceng	0,26	0,26	0,26	0,27	0,29	0,25
14	Kecamatan Sangkapura	0,32	0,32	0,34	0,39	0,26	0,25
15	Kecamatan Sidayu	0,26	0,22	0,23	0,23	0,25	0,20
16	Kecamatan Tambak	0,25	0,23	0,24	0,25	0,29	0,25
17	Kecamatan Ujung Pangkah	0,25	0,28	0,33	0,33	0,32	0,29
18	Kecamatan Wringinanom	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,24

3. Nilai Pertumbuhan Ekonomi (dalam %)

No.	Kecamatan	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kecamatan Balongpanggang	4%	8,5%	5,9%	7,6%	-5%
2	Kecamatan Benjeng	2%	6,8%	8,2%	8,4%	-7%
3	Kecamatan Bungah	9%	6,5%	5,4%	6,5%	-5%
4	Kecamatan Cerme	4%	5,2%	5,2%	4,0%	-4%
5	Kecamatan Driyorejo	1%	5,5%	9,6%	3,9%	-4%
6	Kecamatan Dudusampeyan	9%	4,8%	5,5%	5,5%	-4%
7	Kecamatan Dukun	6%	7,1%	4,3%	7,2%	-4%
8	Kecamatan Gresik	5%	5,4%	5,8%	5,9%	-3%
9	Kecamatan Kebomas	3%	4,5%	7,9%	4,9%	-3%
10	Kecamatan Kedamean	10%	4,6%	9,4%	4,5%	-5%
11	Kecamatan Manyar	4%	4,3%	6,4%	5,5%	-2%
12	Kecamatan Menganti	4%	3,7%	4,5%	5,6%	-3%
13	Kecamatan Panceng	6%	5,0%	6,0%	5,2%	-3%
14	Kecamatan Sangkapura	2%	2,0%	0,5%	4,0%	-8%
15	Kecamatan Sidayu	4%	5,1%	4,8%	1,8%	-2%
16	Kecamatan Tambak	6%	2,0%	5,7%	4,9%	-8%
17	Kecamatan Ujung Pangkah	5%	5,0%	3,9%	8,4%	-4%
18	Kecamatan Wringinanom	4%	12,4%	7,0%	3,0%	-2%



4. Perhitungan Indeks Williamson

Tabel Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten Gresik

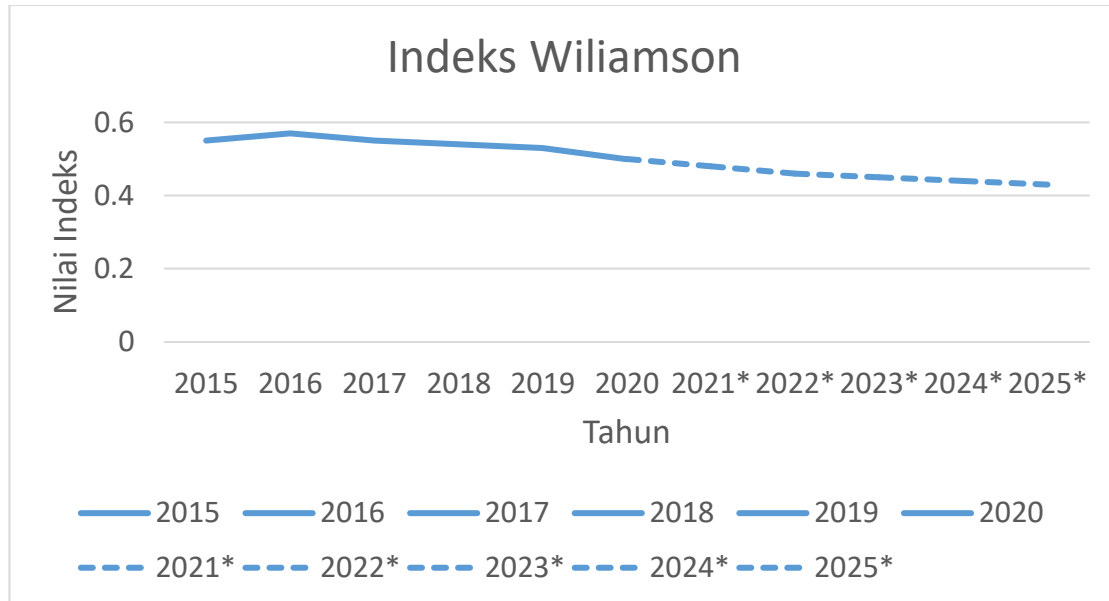
Kecamatan	Klasifikasi	Indeks Williamson						Klasifikasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kecamatan Balongpanggang	Rendah	0,26	0,28	0,30	0,30	0,28	0,25	Rendah
Kecamatan Benjeng	Rendah	0,27	0,36	0,32	0,38	0,39	0,30	Rendah
Kecamatan Bungah	Rendah	0,30	0,29	0,27	0,27	0,26	0,26	Rendah
Kecamatan Cerme	Tinggi	0,64	0,64	0,63	0,62	0,62	0,62	Tinggi
Kecamatan Driyorejo	Tinggi	0,80	0,75	0,73	0,69	0,69	0,65	Tinggi
Kecamatan Dudusampeyan	Rendah	0,15	0,20	0,15	0,24	0,23	0,20	Rendah
Kecamatan Dukun	Rendah	0,25	0,24	0,27	0,28	0,26	0,24	Rendah
Kecamatan Gresik	Tinggi	0,67	0,69	0,61	0,60	0,60	0,58	Tinggi
Kecamatan Kebomas	Tinggi	0,75	0,74	0,72	0,68	0,64	0,61	Tinggi
Kecamatan Kedamean	Rendah	0,22	0,21	0,25	0,26	0,19	0,22	Rendah
Kecamatan Manyar	Tinggi	0,62	0,61	0,62	0,59	0,58	0,56	Tinggi
Kecamatan Menganti	Tinggi	0,74	0,68	0,65	0,65	0,63	0,61	Tinggi
Kecamatan Panceng	Rendah	0,26	0,26	0,26	0,27	0,29	0,25	Rendah
Kecamatan Sangkapura	Rendah	0,32	0,32	0,34	0,39	0,26	0,25	Rendah
Kecamatan Sidayu	Rendah	0,26	0,22	0,23	0,23	0,25	0,20	Rendah
Kecamatan Tambak	Rendah	0,25	0,23	0,24	0,25	0,29	0,25	Rendah
Kecamatan Ujung Pangkah	Rendah	0,25	0,28	0,33	0,33	0,32	0,29	Rendah
Kecamatan Wringinanom	Rendah	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,24	Rendah

5. Proyeksi Perhitungan Indeks Williamson

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Wiliamson Kab Gresik	0,55	0,57	0,55	0,54	0,53	0,5	0,48	0,46	0,45	0,44	0,43

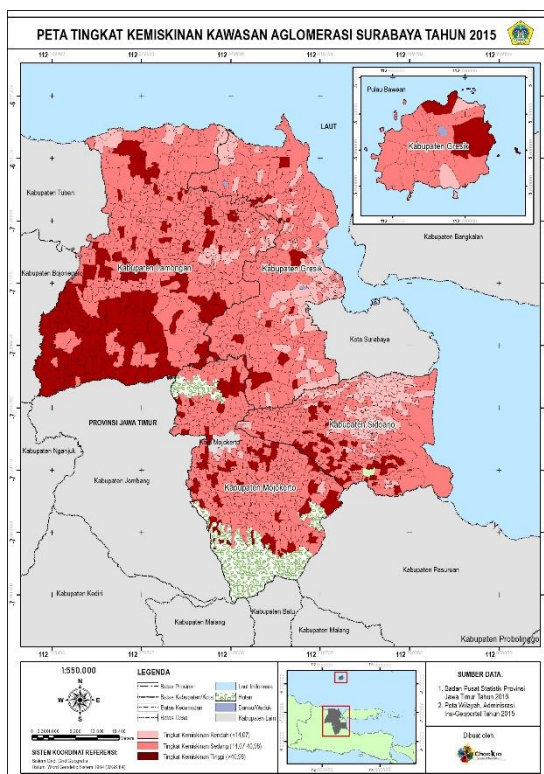
6. Grafik Indeks Williamson

Gambar Grafik Indeks Williasom



Sumber: Data Sekunder, Diolah (2022)

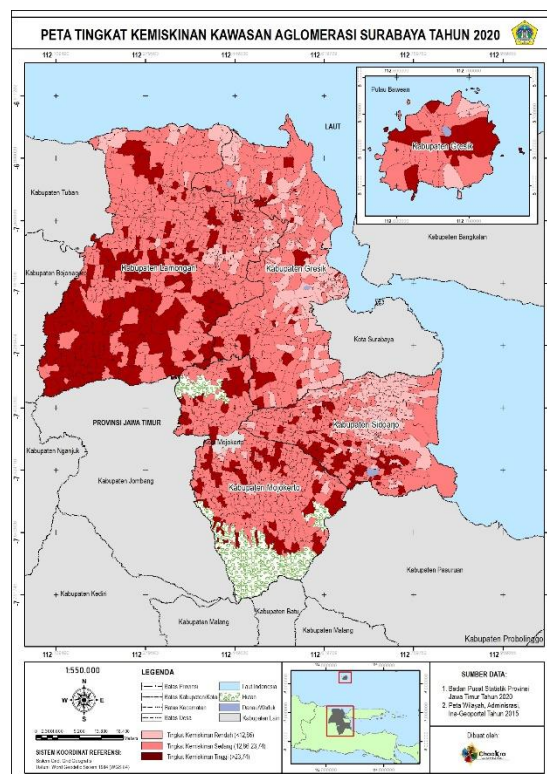
7. Peta Aglomerasi



A

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Gambar Peta Tingkat Kemiskinan Kawasan Aglomerasi Surabaya Tahun 2015



B

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2020

Gambar Peta Tingkat Kemiskinan Kawasan Aglomerasi Surabaya Tahun 2020



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

